



Proposal Perdamaian 2015

**IKRAR BERSAMA UNTUK
MASA DEPAN YANG LEBIH MANUSIAWI:
MENGHAPUS KESENGSARAAN DARI BUMI**

26 Januari 2015

Daisaku Ikeda

Presiden Soka Gakkai Internasional

©2015 The Soka Gakkai. Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Foto sampul: www.goodfon.su

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Soka Gakkai International (SGI) Office of Public Information
15-3 Samoncho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0017, Japan
Tel. +81-3-5360-9830 Fax +81-3-5360-9885
www.daisakuikeda.org
www.sgi.org

ISBN978-4-88417-071-4

Proposal Perdamaian 2015

**IKRAR BERSAMA UNTUK
MASA DEPAN YANG LEBIH MANUSIAWI:
MENGHAPUS KESENGSARAAN DARI BUMI**

oleh Daisaku Ikeda
Presiden, Soka Gakkai International
26 Januari 2015

Sinopsis	6
Proposal Perdamaian 2015	12
Rehumanisasi politik dan ekonomi	15
Reaksi pemberdayaan berantai	23
Perluasan persahabatan sebagai dasar untuk mengakhiri perang	30
Evolusi kreatif PBB	38
Melindungi hak asasi pengungsi	42
Menghapus senjata nuklir	49
Mewujudkan masyarakat global yang berkelanjutan	64
Semangat dasar kita	70
Catatan	72
Daftar Pustaka	74
Proposal Perdamaian Tahunan oleh Daisaku Ikeda	80
Profil Penulis	82

Synopsis

Dalam kesempatan hari jadi ke-40 berdirinya Soka Gakkai International (SGI) ini, saya ingin menyampaikan beberapa buah pemikiran mengenai cara-cara untuk menumbuhkan solidaritas yang lebih kuat di antara penduduk bumi, demi tercapainya perdamaian dan nilai-nilai manusiawi, serta terhapusnya penderitaan yang tak ada gunanya dari Bumi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tengah mengerjakan seperangkat tujuan baru untuk mengikuti Tujuan Pembangunan Milenium (MDG, Millennium Development Goals) dan, Juli lalu, Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG, Sustainable Development Goals) mengeluarkan sebuah proposal yang isinya menunjukkan komitmen untuk melindungi martabat semua orang tanpa kecuali.

Sekarang saya ingin membahas tiga tema prioritas untuk memajukan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan internasional baru PBB dan, dalam skala yang lebih luas, untuk mempercepat upaya menghapus kesengsaraan dari muka planet ini. Ini adalah keinginan guru saya, Josei Toda, dan terus memberi jiwa pada kegiatan-kegiatan para anggota SGI di seluruh dunia.

Yang pertama adalah “rehumanisasi politik dan ekonomi” menjadikan motivasi utama mereka sebagai cara untuk menghilangkan penyebab-penyebab penderitaan manusia. Tenaga penggerak terpenting untuk rehumanisasi politik dan ekonomi adalah solidaritas warga negara biasa yang sudah melantangkan suara dengan didasari komitmen teguh kepada masa depan kolektif kita.

Yang kedua yang ingin saya kaji adalah yang saya sebut “reaksi pemberdayaan berantai”, yang dirangkum dalam ide bahwa revolusi besar dalam diri satu individu saja dapat membantu menciptakan perubahan dalam takdir masyarakat keseluruhan dan memungkinkan terjadinya perubahan dalam takdir segenap umat manusia.

Temprioritasketigaadalahperluasanpersahabatanmenyeberangi perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah dunia koeksistensi (hidup berdampingan dengan damai). Meluaskan solidaritas manusia berdasarkan keprihatinan bersama terhadap ancaman yang kita semua hadapi memegang kunci untuk meringankan penderitaan manusia. Satu hal yang siapa pun dari kita dapat lakukan kapan saja untuk menyumbang pada pembangunan solidaritas itu adalah menciptakan jaringan persahabatan yang lebih luas melalui dialog.

RANGKA KERJA TINDAKAN BERSAMA

Saya selama ini konsisten menekankan dua prasyarat untuk memecahkan persoalan-persoalan global di jantung evolusi kreatif Perserikatan Bangsa-Bangsa saat badan ini menandai hari jadinya ke-70 tahun ini: partisipasi semua negara, dan kolaborasi antara PBB dan masyarakat sipil.

Saya ingin mengajukan usulan spesifik di tiga bidang berikut ini, yang saya rasa sangat membutuhkan tindakan bersama untuk menghapus kata kesengsaraan dari kosakata manusia

1. Bidang pertama untuk tindakan bersama adalah melindungi hak asasi pengungsi dan migran internasional.

Sumber penderitaan para pengungsi adalah terputus dari dunia tempat mereka dapat sepenuhnya merasakan dan mengungkapkan identitas mereka berikut semua hak asasi manusia yang terkait dengan dunia itu.

Meletakkan peringatan penderitaan orang-orang seperti itu sebagai tujuan utama evolusi kreatif Perserikatan Bangsa-Bangsa memang perlu dilakukan jika tercakupnya “semua orang di mana pun”—yang diupayakan dalam SDG yang baru—akan diwujudkan. Sama seperti itu, situasi hak asasi manusia yang dialami 232 juta migran internasional menuntut perhatian mendesak. Saya ingin mengusulkan bahwa tujuan melindungi martabat dan hak asasi mendasar para pekerja migran dan keluarga mereka secara eksplisit dimasukkan dalam SDG.

Lebih jauh saya ingin mengusulkan pengembangan mekanisme bagi negara-negara yang bertetangga agar mereka dapat bekerja sama untuk memberdayakan para pengungsi. Khususnya, saya ingin mengusulkan program-program pemberdayaan gabungan yang bersifat regional. Melalui program-program ini berbagai proyek pendidikan dan bantuan pekerjaan akan mencakup baik populasi pengungsi maupun para pemuda dan wanita negara penampung.

2. Bidang kedua untuk tindakan bersama yang ingin saya bahas adalah menuju terwujudnya dunia tanpa senjata nuklir.

Melalui penandatanganan Pernyataan Bersama mengenai Konsekuensi Kemanusiaan Senjata Nuklir pada Oktober 2014, lebih dari 80 persen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas mengungkapkan keinginan bersama mereka bahwa senjata nuklir tidak akan pernah digunakan dalam keadaan apa pun.

Di sini, saya ingin menelaah dari berbagai perspektif sifat tidak manusiawi senjata nuklir di luar kemampuan merusaknya. Pertama, kapasitas pemusnahan senjata nuklir dalam sekejap menihilkan semua pencapaian masyarakat dan peradaban, menghapus bukti tiap-tiap kehidupan kita, melucuti makna seluruh keberadaan. Kedua, pengembangan dan modernisasi senjata nuklir yang terus-menerus menyebabkan distorsi sosial ekonomi

yang mengerikan. Ketiga, dipertahankannya suatu sikap nuklir membuat negara-negara terkunci dalam ketegangan militer yang tak putus-putus.

Di sini, saya ingin mengajukan dua prakarsa sebagai berikut:

- **Pengembangan suatu kerangka kerja kelembagaan baru untuk pelucutan senjata nuklir, dengan didasari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).**

Saya mendesak negara-negara peserta Konferensi Tinjauan NPT 2015 untuk mengkaji pilihan-pilihan untuk memerinci “langkah-langkah efektif” [untuk pelucutan senjata nuklir] yang dipertimbangkan dalam dan disyaratkan oleh Pasal VI Perjanjian NPT. Dengan konteks seperti ini, saya ingin mendesak kepala pemerintah sebanyak mungkin negara untuk menghadiri Konferensi Tinjauan NPT tahun ini.

Lebih jauh saya mendesak bahwa Konferensi lebih dahulu mengadakan perdebatan mengenai langkah-langkah efektif untuk melucuti senjata nuklir yang disyaratkan Pasal VI NPT. Dengan dilandasi “pelaksanaan yang tegas oleh Negara-negara senjata nuklir untuk mencapai penghapusan total persediaan senjata nuklir mereka hingga membawa pada pelucutan senjata nuklir”, yang ditekankan kembali dalam Konferensi Tinjauan 2000, saya mengusulkan pembentukan komisi pelucutan senjata NPT sebagai organ pelengkap di bawah NPT untuk memastikan komitmen ini dipenuhi secara cepat dan konkret.

- **Adopsi konvensi senjata nuklir.**

Dilandasi evaluasi yang cermat atas hasil Konferensi Tinjauan NPT tahun ini, saya menyarankan konferensi internasional tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelucutan senjata nuklir diadakan pada 2016 dan bahwa konferensi ini memulai proses penyusunan draf konvensi senjata nuklir.

Proses yang saya bayangkan untuk penyusunan suatu perjanjian yang melarang senjata nuklir adalah proses yang meminta setiap

negara untuk berkomitmen pada veto yang diberlakukan sendiri, dan bahwa tindakan mengekang-diri ini akan membentuk anyaman yang bersusun-susun yang mewujudkan suatu era baru—era ketika rakyat semua negara dapat menikmati kepastian bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kengerian yang disebabkan oleh penggunaan senjata nuklir.

Saya berharap bahwa Pertemuan Tingkat Tinggi Pemuda Dunia untuk Penghapusan Senjata Nuklir—rencananya akan diadakan di Hiroshima pada September sebagai prakarsa bersama oleh SGI dan LSM-LSM lain—akan mengadopsi deklarasi generasi muda yang berikrar akan mengakhiri zaman nuklir dan akan membantu memupuk solidaritas yang lebih besar di antara generasi muda dunia untuk mendukung perjanjian pelarangan senjata nuklir.

3. Bidang terakhir untuk tindakan bersama yang ingin saya bahas adalah pembangunan sebuah masyarakat global yang berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, kita harus berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipetik sementara kita bekerja untuk mencegah memburuknya kondisi dan memulai transisi menuju masyarakat nirlimbah (zero-waste society). Upaya seperti itu akan sangat penting dalam pencapaian SDG, dan saya ingin menekankan tak tergantikannya peran kerja sama di antara negara-negara yang bertetangga untuk mencapai tujuan ini.

Konkretnya, saya mengimbau Cina, Korea Selatan, dan Jepang agar bergabung untuk menciptakan sebuah model regional yang akan mencakup praktik-praktik terbaik yang dapat disampaikan kepada dunia. Untuk mendorong kerja sama itu berkembang lebih jauh, sangatlah penting bagi pertemuan tingkat tinggi trilateral Cina-Korea-Jepang untuk diperbaharui kembali. Terlebih lagi, saya berharap para pemimpin ketiga negara akan menandai hari jadi ke-70 akhir Perang Dunia II dengan memasukkan pelajaran-pelajaran dari konflik ini dalam suatu ikrar untuk tidak pernah berperang lagi.

Untuk memperluas pertukaran akar rumput, saya ingin melihat dibentuknya kemitraan generasi muda Cina-Korea-Jepang sebagai sarana orang muda untuk bisa aktif berkolaborasi dalam upaya-upaya mewujudkan SDG atau prakarsa kerja sama trilateral lain. Sejalan dengan usulan tersebut, saya mengusulkan jumlah pertukaran kota kembar (sister-city) antara ketiga negara lebih ditingkatkan lagi.

Saya ingin menekankan bahwa pada akhirnya solidaritas rakyat biasalah yang lebih dari kekuatan apapun juga, akan mendorong umat manusia dalam upaya-upaya kita memenuhi tantangan yang kita hadapi

IKRAR BERSAMA UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH MANUSIAWI: MENGHAPUS KESENGSARAAN DARI BUMI

Proposal Perdamaian 2015
oleh Daisaku Ikeda
Presiden, Soka Gakkai International

Dalam kesempatan hari jadi ke-40 berdirinya Soka Gakkai International (SGI) ini, saya ingin menyampaikan beberapa buah pemikiran mengenai cara-cara untuk menumbuhkan solidaritas yang lebih kuat di antara penduduk bumi, demi tercapainya perdamaian dan nilai-nilai manusiawi, serta terhapusnya penderitaan yang tak ada gunanya dari Bumi.

Masa depan ditentukan oleh kedalaman dan kekuatan ikrar atau sumpah yang dihayati oleh manusia yang hidup di saat sekarang.

Masa depan ditentukan oleh kedalaman dan kekuatan ikrar atau sumpah yang dihayati oleh manusia yang hidup di saat sekarang. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak ada satu orang pun lagi, termasuk generasi-generasi mendatang, yang harus menanggung penderitaan yang menimpa kita sekarang.

Selama tujuh puluh tahun sejak didirikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meluaskan cakrawala kegiatan-kegiatannya untuk menangani beraneka macam isu

global. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG, Millennium Development Goals), yang diadopsi pada tahun 2000 dengan target 2015, dirancang untuk memperbaiki kondisi manusia yang menderita akibat kelaparan dan kemiskinan. Juli lalu, Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG, Sustainable Development Goals)—yaitu tujuan-tujuan baru yang akan melanjutkan berbagai upaya yang dimulai di bawah MDG menuju target 2030—mengeluarkan sebuah proposal yang isinya sangat menarik. Khususnya, kalimat-kalimat seperti “Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun” dan “Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia”^[1] menunjukkan komitmen untuk melindungi martabat semua orang tanpa kecuali.

Upaya-upaya dunia untuk mencapai MDG telah melahirkan keberhasilan-keberhasilan penting seperti mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem sebanyak 700 juta, dan mencapai penurunan besar dalam kesenjangan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menerima pendidikan dasar. Namun, banyak wilayah dan populasi yang masih belum merasakan perbaikan nyata. Karena menyadari masalah ini, Kelompok Kerja Terbuka berusaha menetapkan batas-batas minimum

universal tertentu. Sebagai orang yang sudah mendesak dalam proposal-proposal terdahulu dan di tempat-tempat lain agar tujuan-tujuan internasional baru untuk agenda pembangunan pasca-2015 tidak meninggalkan satu orang pun, saya menyambut baik sikap ini.

Saya teringat bahwa guru saya, presiden kedua Soka Gakkai Josei Toda (1900-58), yang tergugah oleh penderitaan rakyat Hungaria setelah pemberontakan tahun 1956 yang gagal, berkata, “Saya ingin sekali melihat kata ‘kesengsaraan’ tidak lagi dipakai untuk menggambarkan dunia ini, negara mana pun, individu mana pun.”^[2]

Martin Luther King Jr. (1929-68) terkenal dengan pernyataannya, “Keadilan tidak bisa dibagi.”^[3] Ini pula keyakinan Toda, yang tumbuh dari pengalamannya dipenjarabersamapresidenpertamaSokaGakkaiTsunesaburo Makiguchi (1871-1944) karena melawan kebijakan pengendalian-pikiran yang diberlakukan penguasa Jepang yang militeristis selama Perang Dunia II. Toda memahami bahwa perdamaian dan keamanan, kemakmuran dan kebahagiaan, adalah hal-hal yang tidak boleh dinikmati oleh satu kelompok orang saja sementara yang lainnya menderita karena tidak memiliki semua itu. Ketika Perang Korea memanas, Beliau mengungkapkan keprihatinan pribadi yang mendalam, “karena perang yang keji ini, begitu banyak orang yang kehilangan suami dan istri, dan begitu banyak yang sekarang harus mencari-cari anak atau orangtua mereka yang hilang.”^[4]

Dasar dari tindakan-tindakan beliau adalah semangat empati terhadap penderitaan rakyat biasa. Beliau mengungkapkan hal ini dalam visi beliau tentang “nasionalisme global”—bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, tak peduli di mana pun mereka tinggal atau apa pun kebangsaan mereka. Di inti visi ini adalah keinginan yang begitu kuat untuk membebaskan dunia dari kesengsaraan, dan keinginan ini terus memberi jiwa pada kegiatan-kegiatan SGI di bidang perdamaian, kebudayaan, dan pendidikan, serta dalam mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Upaya untuk memasukkan “semua orang di mana pun” yang mengalir di seluruh proposal yang dibuat Kelompok Kerja Terbuka dan untuk

mengimbuu kerja sama lebih lanjut guna mencapai tujuan ini, pasti akan penuh kesulitan. Karena itu, kita harus kembali ke semangat Piagam PBB, yang tidak memberikan pengecualian dalam ikrarnya—seperti tertulis dalam bagian Pembukaan—untuk “menyelamatkan generasi-generasi penerus dari bencana perang”, untuk “menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, pada martabat dan nilai diri manusia”, serta untuk mendukung “kemajuan ekonomi dan sosial semua bangsa”.

Sekarang saya ingin membahas tiga tema prioritas untuk memajukan pencapaian tujuan-tujuan baru pembangunan internasional PBB dan untuk mempercepat upaya menghapus kesengsaraan dari muka planet ini.

MENUMBUHKAN KEMBALI PERI-KEMANUSIAAN PADA (RE)HUMANISASI POLITIK DAN EKONOMI

Tema prioritas pertama adalah “rehumanisasi politik dan ekonomi” sebagai cara untuk menghilangkan penyebab-penyebab penderitaan manusia.

Agustus tahun lalu, Toda Institute for Global Peace and Policy Research, yang saya dirikan untuk menghormati pusaka guru saya, mengadakan konferensi yang diikuti periset-periset senior di Istanbul, Turki. Konferensi ini menganalisis bidang-bidang yang memprihatinkan seperti perang saudara Suriah, konflik Israel-Palestina, situasi di Irak dan Ukraina, serta ketegangan yang meningkat di Asia Timur. Pada saat yang sama, konferensi memberi penekanan pada tren-tren positif yang mulai muncul, serta bertukar pandangan tentang cara mendukung dan memperkuat tren-tren itu. Selain masalah-masalah yang amat menentukan seperti memperkuat PBB dan badan-badan internasional lain serta mengembangkan kekuatan empati, imajinasi, dan kreativitas di kalangan anggota generasi yang lebih muda, ada satu fokus penting pada rehumanisasi politik yang menjadikan peringanan penderitaan individu sebagai motivasi utamanya.

Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR, Universal Declaration of Human Rights) telah menyatakan dengan jelas peran negara dalam melindungi hak asasi manusia, namun negara justru

sering menjadi sumber utama ancaman terhadap kehidupan dan martabat manusia. Masalah ini telah menjadi topik pertukaran pendapat antara saya dengan Sekretaris-Jenderal Toda Institute Dr. Kevin Clements, organisator konferensi tersebut.

Contoh paling menyedihkan untuk hal ini adalah perang. Di tahun-tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II, hanya segelintir negara yang berhasil menghindari keterlibatan dalam konflik bersenjata. Selain itu, dalam begitu banyak kasus, hak asasi dan kebebasan sipil dikekang atas nama keamanan nasional, dan prioritas meningkatkan kekuatan nasional seringkali dicapai dengan mengorbankan anggota masyarakat yang lebih rentan. Di tahun-tahun belakangan ini, berbagai krisis seperti bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem telah memaparkan manusia pada kondisi kemiskinan mendadak. Menanggapi penderitaan semacam itu adalah salah satu tanggung jawab utama sistem politik mana pun. Hal yang sama berlaku di bidang ekonomi.

Dua tahun yang lalu, Paus Francis mengeluarkan tantangan yang luas dikutip kepada sistem ekonomi kita yang sekarang, “Mengapa bila seorang tunawisma yang sudah renta tewas karena cuaca yang kejam itu tidak menjadi berita, tetapi bila pasar saham turun dua poin saja malah menjadi berita?”^[5] Memang benar, obsesi pada indikator-indikator makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali akhirnya menyepelkan perhatian pada kehidupan, martabat, dan mata pencaharian individu, bahkan peningkatan laju kegiatan ekonomi sampai gagal meringankan perjuangan yang dihadapi manusia sehari-hari.

Kata Inggris “politics” (politik) berasal dari istilah Yunani politeia, yang di antara arti-artinya menunjukkan peran warga negara di dalam negara. Istilah untuk “economics” (ekonomi) dalam bahasa Jepang berupa singkatan dari ungkapan Tiongkok berhuruf empat yang berarti “membawa ketertiban pada masyarakat dan meringankan penderitaan rakyat.” Sekarang ini, pengertian asli kata-kata ini sudah dikaburkan, dan prinsip-prinsip penggerak tindakan politik dan ekonomi sepertinya hanya untuk menciptakan penderitaan yang lebih berat lagi bagi mereka yang keadaannya sudah sulit.

Peran politik dan ekonomi adalah di saat krisis menyediakan tempat yang aman, terutama bagi kaum yang rentan.

Ini membuat saya teringat konsep Dharma yang, menurut ajaran-ajaran Buddhis awal, ditekankan oleh Sakyamuni sebagai jalan mendasar yang seharusnya ditempuh manusia. Dharma, yang berasal dari akar kata *dhr*, adalah istilah Sanskrit yang berarti “sesuatu yang menyangga atau menopang”. Dalam terjemahan naskah-naskah suci Buddhis ke dalam bahasa Mandarin, istilah ini dialihkan menjadi istilah yang berarti “hukum” atau “jalan”. Dengan kata lain, Dharma menunjukkan ide bahwa sebagai individu, kita membutuhkan sesuatu yang menyangga atau menopang kita;

bahwa, seperti yang dijelaskan oleh cendekiawan Buddhis Hajime Nakamura (1912-99), ada jalan dan prinsip yang kita harus patuhi dan pertahankan sebagai manusia.^[6]

Meski wajar saja jika aspek-aspek spesifik dalam praktik ekonomi dan politik berubah mengikuti zaman, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati dan ada standar-standar perilaku yang tidak boleh diabaikan. Dalam ajaran-ajarannya selama tahap akhir hidupnya, Sakyamuni mendorong pengikutnya untuk selalu menjalani hidup mereka sesuai dengan Dharma yang mendasar ini. Dia menyamakan Dharma dengan sebuah pulau, untuk mengungkapkan ide bahwa Dharma berfungsi di tengah realitas-realitas masyarakat seperti yang dilakukan sebuah pulau di saat banjir, dengan melindungi nyawa manusia dan menyediakan tempat berlindung. Bila dikembangkan dari sini, dapat kita katakan bahwa peran politik dan ekonomi adalah menyediakan tempat yang aman di saat krisis, terutama bagi kaum yang rentan, sebagai basis untuk mereka memperoleh kembali harapan yang dibutuhkan untuk hidup.

Jika kita pikirkan kembali asal mula politik dari sudut pandang rakyat biasa, kita menemukan harapan penuh doa bahwa melalui satu hak suara atau

partisipasi, mereka dapat menjadikan masyarakat sebuah tempat yang lebih baik. Sama seperti itu, asal mula ekonomi dapat ditemukan dalam keinginan kuat rakyat biasa untuk memainkan peran yang berguna dalam masyarakat melalui pekerjaan atau profesi mereka. Namun, ketika politik berkiperah pada skala luas, kita menemukan apa yang selama ini digambarkan sebagai suatu “defisit demokrasi”, yaitu ketika kehendak rakyat tidak tecermin dalam kebijakan. Fenomena yang bersesuaian di bidang ekonomi adalah perilaku yang keterlaluan di sektor keuangan, ketika spekulasi yang tak terkendali mendatangkan kehancuran pada perekonomian yang sesungguhnya.

Kalau begitu, apa prinsip-prinsip yang harus kita anut untuk mengekang tren-tren ini dan melakukan penyesuaian arah yang dibutuhkan pada sistem politik dan ekonomi kita sekarang?

Saya rasa kata-kata berikut ini, yang ditulis oleh Mahatma Gandhi (1869-1948) kepada seorang temannya, relevan di sini, “Ingatlah wajah orang paling miskin dan paling lemah yang pernah Anda lihat, lalu tanyalah pada diri sendiri apakah langkah yang Anda pertimbangkan itu akan bermanfaat baginya.”^[7] Yang Gandhi desak agar selalu kita ingat di saat mengambil keputusan-keputusan penting adalah penderitaan manusia nyata yang berbagi dunia ini dengan kita, bukan dinamika politik tertentu atau teori ekonomi tertentu.

Saya rasa ini sangat sejalan dengan ide Jalan Tengah yang diajarkan dalam Buddhisme. Jalan Tengah tidak berarti sekadar menghindari pikiran atau tindakan ekstrem. Sebaliknya, istilah ini mengacu ke proses mencapai jalan itu; yakni, proses menjalani hidup dan meninggalkan jejak kita di masyarakat sembari terus-menerus menginterogasi tindakan-tindakan kita sendiri untuk memastikan bahwa semua tindakan itu sesuai dengan jalan kemanusiaan. Dalam mendorong manusia untuk mengandalkan Dharma seperti sebuah pulau, Sakyamuni juga mendesak mereka untuk mengandalkan diri sendiri. Dengan berbuat begitu, Sakyamuni menunjukkan arti penting Jalan Tengah yang sesungguhnya: bukan untuk tanpa banyak pikir mengikuti setiap dorongan hati, melainkan sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh Hajime Nakamura, “mengandalkan diri otentik kita, diri yang dapat kita yakini dan banggakan setiap saat.”^[8]

JALAN TENGAH

Jalan Tengah adalah istilah Buddhis dengan konotasi yang kaya. Dalam pengertian yang terluas, istilah ini mengacu ke pandangan tercerahkan sang Buddha tentang hidup, juga tindakan atau sikap yang akan menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain. Konsep ini melampaui dualitas yang mendasari sebagian besar pemikiran. Sebagai contoh, Buddhisme menggambarkan hidup sebagai “suatu realitas yang ilusif, yang melampaui kata-kata dan konsep-konsep eksistensi dan non-eksistensi. Hidup bukanlah eksistensi, bukan pula non-eksistensi, tetapi memperlihatkan kualitas-kualitas keduanya.” Dengan kata lain, hidup itu sendiri adalah ekspresi tertinggi keharmonisan berbagai kontradiksi. Kearifan yang tumbuh dari pandangan yang tercerahkan terhadap hidup akan menghasilkan kemampuan untuk merekonsiliasi posisi-posisi yang kelihatannya bertentangan, untuk melampaui hal-hal ekstrem dari pandangan-pandangan yang berseberangan, untuk mengukuhkan diri pada realitas hidup dan dengan demikian melihat jalan menuju perdamaian.

Bila setiap orang dari kita mempertimbangkan semua orang yang akan terkena dampak tindakan kita dan merenungkan beratnya tanggung jawab kita, ini akan menjadi jendela untuk menunjukkan diri otentik kita dan untuk mengasah kemanusiaan kita. Dengan mempertahankan upaya ini, kita dapat semakin dalam lagi mengkaji makna dan peran sistem-sistem politik dan ekonomi, serta menciptakan kondisi-kondisi di dalam masyarakat untuk rehumanisasi keduanya. Seperti itulah dinamisme hakiki Jalan Tengah.

Keputusan-keputusan yang diambil dengan dasar ini mungkin saja disambut kritik atau diabaikan karena dianggap bertentangan dengan suasana masyarakat atau arus zaman. Tetapi, kegagalan untuk tetap setia pada keyakinan diri bukanlah sekadar kegagalan pasif untuk berbuat kebaikan; jauh lebih buruk lagi, itu dapat mengundang jenis kejahatan yang akan mendatangkan penderitaan pada sejumlah besar orang. Inilah pernyataan menggebu Tsunesaburo Makiguchi, presiden pendiri Soka Gakkai.

Dengan ucapan dan tindakannya, Beliau secara langsung menantang fasisme militeristis Jepang masa perang dan kebijakan pengendalian pikiran. Dimulai sekitar tahun 1940, pertemuan-pertemuan cikal bakal Soka Gakkai, yakni Soka Kyoiku Gakkai (Masyarakat Pendidikan yang Menciptakan Nilai), diawasi oleh Polisi Khusus. Terbitan berkala organisasi ini, *Kachi sozo*, dipaksa berhenti terbit pada Mei 1942 dan, sejak Juli 1943, Makiguchi ditahan dan diinterogasi.

Menurut catatan, beliau memberikan jawaban berikut ini untuk salah satu pertanyaan para interogator:

Kadang-kadang, orang yang terlalu memusingkan pendapat masyarakat, memuaskan dirinya dengan cara hidup yang tidak mendorongnya berbuat kebaikan atau kejahatan nyata, atau hidup dengan cara di mana kebaikan yang mereka lakukan sangat terbatas. Dalam kasus yang ekstrem, ini membawa pada pandangan bahwa orang boleh berbuat apa saja selama itu tidak dilarang oleh hukum. Saya menganggap semua cara hidup seperti itu suatu bentuk pemfitnahan Dharma Buddhis.^[9]

Yang Makiguchi maksudkan dengan pemfitnahan adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Buddhisme. Tetapi, dalam pengertian yang lebih luas, beliau mendorong kita untuk merenungkan semua tindakan yang tidak selaras dengan jalan kemanusiaan. Di dasar begitu banyak contoh kegiatan politik dan ekonomi yang berujung pada kesengsaraan nyata, kita menemukan sikap tidak acuh terhadap kepiluan orang lain dan keinginan kuat untuk membenarkan diri, seperti yang Makiguchi kutuk. Selama cara

SOKA KYOIKU GAKKAI DAN PENINDASAN AGAMA SELAMA PERANG DUNIA II

Soka Kyoiku Gakkai (Masyarakat Pendidikan yang Menciptakan Nilai) didirikan oleh Tsunesaburo Makiguchi dan Josei Toda pada tahun 1930. Awalnya ini hanya sekelompok kecil pendidik yang berdedikasi pada reformasi pendidikan. Tetapi, kelompok ini perlahan-lahan berkembang

menjadi organisasi dengan keanggotaan lebih luas, yang mendukung Buddhisme Nichiren sebagai cara untuk mereformasi tidak hanya pendidikan tetapi masyarakat keseluruhan. Ini membawa kelompok ini ke dalam konflik langsung dengan pemerintah militeristis masa itu yang memandang peran pendidikan adalah untuk mencetak rakyat menjadi pelayan negara dan memaksakan ideologi Shinto Negara sebagai cara untuk membenarkan agresi masa perangnya. Sepanjang akhir tahun 1930-an dan selama perang, anggota Soka Kyoiku Gakkai semakin diawasi dan diganggu polisi. Karena penindasan oleh pemerintah, Soka Kyoiku Gakkai benar-benar hancur. Baik Makiguchi maupun Toda ditangkap sebagai “penjahat pikiran” pada tahun 1943, dan Makiguchi meninggal di penjara pada tahun 1944.

berpikir ini ada di mana-mana, bahkan keberhasilan meraih kemakmuran pun tidak akan terbukti berkelanjutan, tetapi sebaliknya akan melahirkan kesengsaraan yang dipicu oleh sikap *apres-moi-le-deluge* (kurang lebih berarti: apa pun yang terjadi setelah aku pergi, aku tak peduli) yang egois.

Meluasnya sikap semacam itu membuat tantangan memfokuskan kembali kegiatan-kegiatan politik dan ekonomi pada peringanan penderitaan manusia—rehumanisasi—semakin penting.

Beberapa gerakan ke arah ini sudah terlihat. Sebagai contoh, 110 negara sudah mendirikan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional sejalan dengan seruan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini mendorong ditetapkannya kerangka kerja legal untuk perlindungan hak asasi manusia dan pendidikan hak asasi manusia. Dalam Proposal Perdamaian tahun 1998 yang saya buat, saya mendesak agar LSM-LSM diikutsertakan dalam kemitraan konstruktif demi menemukan bentuk yang optimal untuk lembaga-lembaga itu.^[10]

Di bidang ekonomi, pada Mei tahun lalu, sebelas anggota Uni Eropa menyepakati implementasi gabungan suatu pajak transaksi keuangan. Dengan bercermin pada pelajaran dari krisis keuangan tahun 2008 dan kerasnya pukulan krisis itu pada perekonomian dunia, langkah ini akan menetapkan suatu tarif untuk memajaki transaksi keuangan sebagai cara untuk membuat

orang enggan melakukan spekulasi berlebihan, dan untuk menghasilkan pendapatan bagi program-program redistribusi. Keputusan itu mungkin diterapkan mulai tahun 2016. Dalam proposal saya enam tahun yang lalu, saya menyerukan bahwa biaya solidaritas internasional semacam itu diberlakukan secara lebih luas untuk mendukung pencapaian MDG. Waktu itu saya mengusulkan bahwa ide-ide seperti pajak transaksi keuangan dapat menjadi unsur dalam suatu persaingan positif di mana negara-negara saling bersaing untuk mengembangkan ide-ide dan visi-visi baru untuk masa depan.^[11] Pencapaian SDG membutuhkan lebih banyak lagi pemikiran kreatif semacam ini.

Bukan sekadar jumlah, melainkan kekuatan dan kedalaman solidaritas kita yang akan menempatkan kita di jalan menuju rehumanisasi politik dan ekonomi.

Tenaga penggerak terpenting untuk rehumanisasi politik dan ekonomi adalah solidaritas warga negara biasa yang sudah melantangkan suara dengan didasari komitmen teguh kepada masa depan kolektif kita. Dalam sebuah karya awal, Makiguchi menekankan bahwa semangat penghidup masyarakat tidak berdiri terpisah dari setiap individu, dan bahwa suatu kesadaran sosial baru akan tumbuh dengan disampaikan dan disebarkannya perubahan kesadaran dalam diri individu-individu.^[12]

Ketika saya bertukar pendapat dengan pemikir perdamaian Elise Boulding (1920-2010) mengenai cara-cara transformasi sosial, dia menyatakan, “Saya sudah lama percaya bahwa dunia yang sejahtera dan damai itu bisa terwujud jika kita mengabdikan upaya habis-habisan untuk mengembangkan setiap anggota komunitas.”^[13] Dia juga berpendapat bahwa arah masyarakat di masa depan sesungguhnya ditentukan oleh 5 persen warga yang aktif dan berkomitmen. Yang 5 persen ini pada akhirnya mengubah

kebudayaan secara keseluruhan. Saya menimba harapan yang amat besar dari keyakinannya ini.

Dalam pengertian ini, bukan sekadar jumlah, melainkan kekuatan dan kedalaman solidaritas kita yang akan menempatkan kita di jalan menuju rehumanisasi politik dan ekonomi. Menumbuhkan solidaritas, di dalam negeri dan internasional, di antara warga negara biasa yang sangat ingin melihat tidak seorang pun menderita dalam kesengsaraan adalah kunci untuk mengubah arah sejarah.

REAKSI BERANTAI DARI PEMBERDAYAAN

Tema prioritas kedua yang ingin saya kaji adalah yang saya sebut “reaksi pemberdayaan berantai”, sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan mengatasi dan mengubah penderitaan.

Dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir ini, bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem telah mendatangkan kerusakan parah dan menimbulkan krisis-krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Di antaranya adalah gempa bumi Kobe (1995), gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia (2004), gempa bumi Haiti (2010), gempa bumi dan tsunami Jepang Timur (2011), serta Taifun Haiyan, yang menerjang Filipina pada tahun 2013. Menurut data statistik PBB, 22 juta orang terpaksa mengungsi akibat bencana-bencana alam selama 2013, jumlah yang kira-kira tiga kali lebih besar daripada jumlah yang terusir dari rumah mereka akibat konflik bersenjata.^[14]

Kesedihan mendalam karena kehilangan rumah adalah sesuatu yang juga pernah saya alami. Selama Perang Dunia II, buruknya kesehatan ayah saya dan perekrutan empat kakak lelaki saya ke dalam wajib militer melemahkan keuangan keluarga, hingga kami terpaksa menjual rumah masa kecil saya. Sesudahnya, rumah yang kami tinggali sesudah itu dirubuhkan untuk membuat jalur penahan kebakaran, dan tak lama setelah kami pindah ke rumah baru, rumah baru itu dihantam bom pembakar dan terbakar habis.

Karena pengalaman ini, saya dapat dengan mudah membayangkan kesedihan dan keputusasaan yang dirasakan oleh mereka yang kehilangan

orang-orang terkasih dan terpaksa meninggalkan rumah yang sudah begitu akrab bagi mereka. Ini kepedihan karena kehilangan dunia yang tadinya ditinggali. Tantangan sesungguhnya dalam upaya restorasi dan pemulihan haruslah mengembalikan harapan dan keinginan hidup semua korban. Untuk mencapai tujuan ini, upaya terpadu masyarakat sebagai kesatuan sangatlah penting.

Pengalaman kehilangan tempat kita—perasaan memiliki dan menjadi bagian dari komunitas—sesungguhnya ada di mana-mana, meski seringkali dalam bentuk yang tidak sedramatis itu. Sekali lagi mengambil contoh Jepang, diperkirakan bahwa satu dari lima orang di atas usia 65 tahun hidup dalam kemiskinan dan satu dari enam anak tidak tercukupi kebutuhan dasarnya, termasuk tidak terjamin kebutuhan pangannya.^[15] Bagi banyak orang, kepedihan akibat kemiskinan ekonomis ini dilipatgandakan oleh rasa keterasingan sosial.

Dalam mencari solusi untuk masalah ini, saya rasa kita dapat menggali wawasan dari pandangan filosof politik Amerika Martha C. Nussbaum. Nussbaum mencatat bahwa konsep-konsep tradisional mengenai kontrak sosial dirumuskan tanpa memperhitungkan kaum wanita, kaum lansia, anak-anak, dan penyandang cacat. Dia juga menyebut pengaruh utilitarianisme sebagai alasan mengapa penderitaan kaum tertentu tidak dihiraukan. Dia menyatakan:

Maka kepedihan dan kesengsaraan satu orang bisa saja tertutup oleh melimpahnya keberuntungan begitu banyak orang. Di sini suatu fakta moral yang amat sangat penting—bahwa setiap orang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani—telah terhapus.^[16]

Nussbaum mendesak kita untuk bergerak melampaui ide saling menguntungkan sebagai satu-satunya prinsip pengatur untuk masyarakat, dan menyerukan dilakukannya konfigurasi ulang berdasarkan konsep martabat manusia yang tidak mengucilkan seorang pun. Dia menegaskan bahwa setiap orang dari kita, karena alasan kesehatan yang buruk, usia, atau kecelakaan, mungkin pada suatu saat membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup. Dia mendesak bahwa kita semua mempertimbangkan pertanyaan perlunya suatu

arah baru bagi masyarakat sebagai masalah kepentingan pribadi yang sangat mendalam.

Tesis Nussbaum ini memiliki banyak sekali kesamaan dengan Buddhisme, yang menjadikan pertanyaan bagaimana kita menghadapi penderitaan yang sudah pasti menyertai tahap-tahap kehidupan, yakni kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian sebagai perhatian utamanya. Seperti yang dilambangkan dalam kisah empat perjumpaan yang terkenal itu, sebelum memasuki kehidupan religius, Sakyamuni begitu bersedih—lebih sedih lagi daripada oleh realitas usia tua dan penyakit—oleh fakta bahwa orang terpaksa menghadapi penderitaan ini dalam keterasingan, sekarat sendirian di pinggir jalan, atau terbaring sakit tanpa perhatian atau perawatan. Sepertinya dia khususnya tergugah oleh terputusnya kontak dengan orang lain serta keterkucilan saat mengalami penderitaan.

Pada kenyataannya, selain kegiatan-kegiatannya sebagai guru, Sakyamuni secara teratur merawat dan mengurus orang-orang seperti itu, dan dia dengan keras menegur murid-muridnya jika mereka menutup mata terhadap kondisi-kondisi itu. Ada satu ajaran yang artinya “Bila kebutuhan itu muncul, senang [rasanya jika ada] teman”.^[17] Baik penyakit maupun usia tua sama sekali tidak mengurangi nilai hakiki hidup kita. Meski begitu, orang semakin putus asa bila mereka terasing dari yang lain dan tidak bisa merasakan suatu rasa keterhubungan dan rasa diterima apa adanya. Ini sesuatu yang tidak dapat Sakyamuni abaikan.

Salah satu ajaran utama Buddhisme Mahayana adalah gagasan sebab musabab yang saling bergantung, bahwa dunia ini merupakan anyaman keterhubungan hidup dengan hidup. Pemahaman atas kesaling-terhubungan ini dapat membantu kita mengubah pengalaman penyakit dan usia tua menjadi peluang untuk meninggikan dan memuliakan hidup kita serta hidup orang lain. Tetapi, menyadari kesaling-terhubungan ini dengan akal saja tidak cukup untuk mewujudkan transformasi positif ini.

“Bila kita membungkuk kepada sebuah cermin, sosok di cermin itu balas membungkuk kepada kita sebagai penghormatan.”^[18] Seperti yang diilustrasikan kutipan ini, hanya bila kita merasakan dan menghargai dalam diri orang lain suatu martabat yang dijunjung dan tak tergantikan seperti dalam hidup kita sendiri sajalah kesaling-terhubungan kita menjadi nyata.

Pada saat itulah air mata dan senyuman yang saling kita berikan menyulut suatu keinginan berani untuk hidup dalam diri setiap orang dari kita.

EMPAT PERJUMPAAN

Kisah empat perjumpaan muncul dalam berbagai naskah suci Buddhis sebagai motivasi Shakyamuni untuk meninggalkan dunia sekuler dan mengejar kehidupan religius. Shakyamuni terlahir sebagai pangeran dan menjalani kehidupan yang terkucil di dalam istana, terlindung dari paparan penderitaan manusia. Dalam tiga perjalanan ke luar tembok istana yang jarang sekali dia lakukan, dia bertemu seorang pria yang keriput karena usia, seorang yang sakit keras, dan sesosok mayat. Melalui tiga pertemuan ini, Shakyamuni tersadar akan empat penderitaan kelahiran, penyakit, usia tua, dan kematian. Perjumpaan keempat adalah dengan seorang pertapa yang memancarkan aura kemuliaan yang tenang sehingga menginspirasi Shakyamuni untuk memulai pencarian spiritual demi memahami bagaimana penderitaan-penderitaan dalam kondisi manusia itu dapat diatasi.

Psikolog Erik H. Erikson (1902-94), yang terkenal karena karyanya mengenai konseptualisasi identitas, menawarkan suatu visi yang sangat mirip dengan dinamisme sebab musabab yang saling bergantung:

Di sini, hidup bersama bermakna lebih dari sekadar kebetulan berdekatan. Hidup bersama berarti bahwa tahap-tahap kehidupan individu itu “saling-berlangsung”, saling bertaut, dengan tahap-tahap orang lain yang menggerakkan individu itu sementara dia menggerakkan orang lain.^[19]

Di sini, saya ingin merujuk ke ide-ide Erikson sementara saya mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang tak berhingga banyaknya yang muncul dari ajaran sebab musabab yang saling bergantung, yaitu, kemampuan memberdayakan-diri-sendiri yang memungkinkan manusia yang dibebani penderitaan menerangi komunitas dan masyarakat mereka secara keseluruhan dengan cahaya martabat batin mereka.

Yang pertama dari ide-ide Erikson yang ingin saya jadikan rujukan

adalah bahwa manusia yang dewasa perlu merasa dibutuhkan.^[20] Menurut pengertian saya, ini berarti bahwa seperti apa pun kondisi kita, selama kita dibuat merasa dibutuhkan oleh orang lain, kita akan digerakkan oleh keinginan untuk menanggapi. Keinginan ini membangunkan kemampuan-kemampuan hidup di dalam diri, menjaga api martabat manusia tetap menyala.

Ini membuat saya teringat pada teladan Elise Boulding, yang saya kutip tadi, dan cara dia menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya. Beberapa tahun sebelum wafatnya, Dr. Boulding ditengok oleh beberapa anggota SGI. Dengan usia lebih dari 80 tahun, dia menjelaskan bahwa meski dia tidak lagi mempunyai energi untuk mengerjakan buku-buku lengkap, dia masih sanggup menyumbangkan pengantar untuk buku-buku yang ditulis oleh teman dan mahasiswanya, dan dengan gembira memenuhi permintaan seperti itu.



Elise Boulding (kanan) di fasilitas perawatan North Hill dekat Boston beberapa bulan sebelum meninggal pada 24 Juni 2010

Sesudah memasuki panti perawatan karena kondisinya memburuk, dia menghabiskan setiap hari dengan dimotivasi oleh pikiran bahwa pasti ada sesuatu yang dapat dia lakukan, meski dengan berbagai keterbatasan yang dia hadapi. Muridnya, Dr. Kevin Clements, mengenang bahwa Dr. Boulding berkata bahwa dia merasa dia bisa mendatangkan kebaikan pada orang-orang di sekelilingnya dengan tersenyum, juga dengan memberikan pujian dan mengucapkan terima kasih kepada staf medis atas kebaikan mereka. Sampai tepat menjelang ajalnya, dia terus menyambut para pengunjung dengan semangat keramahtamahan yang indah, persis seperti yang selalu dia tunjukkan kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya.

Seperti yang diperagakan Dr. Boulding, kita selalu mampu memelihara rasa terhubung dengan orang lain, dan dengan kemampuan ini kita dapat memberikan momen-momen kebahagiaan tulus kepada orang-orang di sekeliling kita, hingga membuat kemanusiaan kita lebih berkilau lagi. Momen-momen ini menjadi catatan keberadaan kita, yang tersimpan dalam hati kita sendiri dan hati orang lain. Kecemerlangan hidup yang mulia ini adalah manifestasi suatu pemberdayaan yang teguh bertahan dalam keadaan apa pun.

Satu unsur lain dalam pemikiran Erikson adalah ide bahwa upaya untuk menata ulang makna hidup bersama memiliki kekuatan untuk mencegah penderitaan menyebar dan menimbulkan siklus yang merusak. Kita tidak mungkin mengulangi hidup kita. Tetapi, dengan menceritakan kepada orang lain langkah-langkah yang telah membawa kita ke saat ini, kita dapat merumuskan lagi makna peristiwa-peristiwa yang lalu. Erikson menganggap ini sumber harapan.

Hal ini dapat dilihat dalam praktik kegiatan-kegiatan keimanan SGI, khususnya kegiatan berbagi pengalaman pribadi, karena melalui kegiatan ini para pelaksana Buddhisme Nichiren bersama-sama mengembangkan keyakinan diri yang lebih dalam. Tradisi mengadakan pertemuan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil ini dimulai sejak masa presiden pendiri Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi.

Di sini orang-orang berbicara tentang apa yang mendatangkan

kebahagiaan pada mereka dan bagaimana mereka menemukan makna dalam hidup, juga cobaan-cobaan seperti wafatnya anggota keluarga, penyakit, kesulitan keuangan, kesulitan di pekerjaan, masalah keluarga, pengalaman diskriminasi atau prasangka. Inilah tempat para anggota bersama-sama mengakui berat dan tak tergantikannya perjalanan hidup setiap individu, tempat air mata kegembiraan dan kesedihan dengan bebas dititikkan bersama, dan orang-orang tersemangati dalam perjuangan untuk mengubah penderitaan.

Melalui kegiatan berbagi seperti itu, si pembicara mengembangkan kesadaran yang jernih bahwa setiap dan semua pengalaman sebenarnya merupakan tonggak penting dalam pembentukan dirinya saat ini, yang membuatnya mampu memakai pengalaman-pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk kemajuannya di masa depan. Bagi yang mendengar, pengalaman yang diceritakan itu dapat membantu memunculkan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan mereka sendiri. Reaksi pemberdayaan yang berantai ini, yang dilandasi empati, adalah jantung praktik keimanan kita.

Yang juga ingin saya tekankan adalah luasnya dampak kisah hidup satu individu yang sudah berhasil menemukan suatu kesadaran akan tujuan hidup dari dalam relung-relung penderitaan pribadi. Kisah-kisah hidup ini melampaui perbatasan negara, menghubungkan generasi-generasi, serta memberikan keberanian dan harapan kepada banyak orang.

Erikson melihat hidup seperti itu dalam diri Gandhi dan menganggap Gandhi sebagai model sempurna filosofinya, bahkan sampai menulis sebuah gambaran biografis. Erikson menggambarkan orang-orang muda yang berkumpul di sekitar Gandhi sebagai berikut:

Orang-orang muda ini, yang begitu berbakat dalam berbagai hal, sepertinya sudah dipersatukan dalam satu “ciri” kepribadian, yaitu, perhatian yang tumbuh dini dalam diri mereka kepada kaum yang terlantar dan teraniaya, mula-mula di dalam keluarga mereka, dan kemudian dalam cakupan perhatian yang lebih dalam dan luas.^[21]

Proses ini tak diragukan lagi mencerminkan motivasi Gandhi sendiri. Pengalamannya didiskriminasi sewaktu muda membuatnya memperjuangkan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan, akhirnya, dia berdedikasi pada gerakan nonkekerasan untuk kemerdekaan India. Keinginan terbesarnya adalah agar seluruh umat manusia, tanpa satu pun pengecualian, terbebas dari penindasan. Gelora yang menggebu inilah yang menggerakkan orang-orang muda yang bekerja bersama Gandhi.

Sesudah Gandhi wafat, teladannya menjadi bintang penunjuk jalan bagi mereka yang berjuang untuk tujuan martabat manusia, di antaranya ada Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela (1918-2013). Ketika saya bertemu Presiden Mandela pada Juli 1995, kami membahas sebuah artikel tentang pengalaman Gandhi dipenjara yang Mandela sumbangkan kepada sebuah jurnal akademis untuk memperingati hari jadi ke-125 kelahiran Gandhi—saya juga menyumbangkan sebuah esai. Mandela menyatakan:

Maka Gandhi sang tahanan pun bertabah diri di awal abad kita. Meski terpisah dalam waktu, tetap ada ikatan di antara kami, dalam pengalaman penjara yang sama-sama kami jalani, penolakan kami terhadap hukum-hukum yang tidak adil, dan fakta bahwa kekerasan mengancam cita-cita kami untuk perdamaian dan rekonsiliasi.^[22]

Bahwa Gandhi sudah menapaki jalan penuh cobaan ini tak diragukan lagi menjadi sumber kekuatan yang penting bagi Mandela selagi Mandela sendiri pantang menyerah menjalani masa tahanan yang berlanjut lebih dari 27 tahun.

Lima puluh tahun yang lalu, saya mulai menulis novelisasi multi-jilid sejarah Soka Gakkai, *Revolusi Manusia*, yang tema intinya adalah bahwa revolusi besar dalam diri satu individu saja dapat membantu menciptakan perubahan dalam takdir masyarakat keseluruhan dan memungkinkan terjadinya perubahan dalam takdir segenap umat manusia. Ini merangkum ide reaksi pemberdayaan berantai yang kemungkinan-kemungkinannya yang tak terbatas meluas dalam ruang melintasi perbatasan negara dan dalam waktu untuk menautkan generasi-generasi yang berbeda.

PERLUASAN PERSAHABATAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAKHIRIPERANG

Tema prioritas ketiga yang ingin saya bahas adalah perluasan persahabatan menyeberangi perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah dunia koeksistensi (hidup berdampingan dengan damai).

Di tahun-tahun terakhir ini, ada perubahan-perubahan penting pada sifat konflik yang menimbulkan masalah-masalah baru. Semakin sering terjadi internasionalisasi konflik-konflik internal karena negara-negara dan kelompok-kelompok lain menjadi peserta aktif. Perkembangan semacam ini telah, misalnya, semakin merumitkan prospek gencatan senjata atau perdamaian dalam perang saudara Suriah.

Selain itu, tujuan aksi militer perlahan-lahan bergeser. Tujuan perang seperti yang didefinisikan oleh pemikir militer Jerman Carl von Clausewitz (1780-1831) adalah memaksa lawan menerima kehendak kita. Tetapi sekarang, penekanannya lebih besar pada pemusnahan kelompok mana pun yang dianggap musuh. Di daerah-daerah konflik, semakin lazim saja serangan militer yang dikendalikan dari jauh justru melukai atau membunuh warga sipil, termasuk anak-anak. Kita hanya bisa berspekulasi mengenai hasil akhir aksi militer yang dilakukan tanpa ragu seperti itu, tanpa memikirkan bahwa si musuh adalah manusia, atau kemungkinan bahwa mereka juga punya hak untuk hidup.

Kengerian yang ditimbulkan oleh kemajuan dramatis dalam teknologi senjata, digabung dengan ideologi pemusnahan, tidak hanya bertentangan dengan isi Hukum Humaniter Internasional tetapi, yang lebih mendasar, tidak diperbolehkan menurut jalan kemanusiaan.

Tahun lalu, PBB memulai perdebatan mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Sistem Senjata Otonom Mematikan (LAWS, Lethal Autonomous Weapon System), atau “robot pembunuh”. Kita harus sepenuhnya menyadari fakta bahwa kita berdiri di ambang otomatisasi perang skala penuh.

Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa ideologi-ideologi

pemusnahan tidak terbatas pada daerah-daerah konflik, tetapi telah mengakar di berbagai tempat di seluruh dunia. Pada Desember 2013, PBB meluncurkan prakarsa Human Rights Up Front (Front Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia), yang bertujuan memperhatikan tanda bahaya yang tersirat dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia satu per satu dan merespons pelanggaran itu sebelum memburuk menjadi kekejaman massal atau kejahatan perang.

Pidato yang berisi kebencian yang didasari SARA, misalnya, sekarang menjadi masalah sosial yang serius di banyak negara. Bahkan sekalipun tidak menimbulkan kekejaman langsung berupa kejahatan SARA, pidato seperti itu tumbuh dari desakan keji yang sama untuk menyakiti orang lain. Maka, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Tidak ada satu orang pun yang menganggap kekejaman atau penindasan berdasarkan prasangka yang ditujukan kepada mereka atau keluarga mereka sebagai sesuatu yang dapat diterima. Tetapi, bila ditujukan pada etnik atau populasi lain, bukan tidak biasa jika orang menganggap itu bisa dibenarkan karena kesalahan atau kelemahan tertentu di pihak korban.

Untuk mencegah situasi seperti itu memburuk, langkah pertama adalah mengembangkan cara untuk memaksa diri berhadapan muka dengan pihak lain itu, bebas dari jenis psikologi kolektif semacam ini. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu episode dari Sutra Vimalakīrti yang menggambarkan interaksi antara murid Sakyamuni, Sariputra, dan seorang dewi, mengandung pelajaran yang dapat dipetik.

Sakyamuni mendesak muridnya Manjushrī untuk mengunjungi rumah pemeluk awam Vimalakīrti, yang sedang menderita sakit. Seorang lagi murid utama Sakyamuni, Sariputra, memutuskan untuk menemani Manjushrī. Kunjungan itu berujung pada diskusi panjang lebar antara Manjushrī dan Vimalakīrti tentang ajaran-ajaran sang Buddha.

Ketika diskusi mencapai klimaks, seorang dewi yang ada di antara hadirin menghiasi semua orang dengan bunga sebagai ungkapan kegembiraan. Sariputra, sambil berkata bahwa helai-helai bunga seperti itu tidak sesuai untuk seorang pelaksana jalan [Kebuddhaan], mencoba menepis

SUTRA VIMALAKĪRTI

Sutra Vimalakīrti adalah sutra Buddhis Mahayana. Vimalakīrti, tokoh utama sutra ini, adalah warga negara Vaishālī yang kaya dan terpandang di masa Shakyamuni. Vaishālī diduga terletak di daerah yang sekarang negara bagian Bihar di wilayah barat laut India. Vimalakīrti menguasai doktrin-doktrin Mahayana dan pandai mengajarkan doktrin-doktrin itu kepada orang lain. Dia adalah pemeluk awam Mahayana yang ideal. Sutra ini mengisahkan berbagai cerita tentang bagaimana Vimalakīrti memperlihatkan pemahaman yang lebih baik atas ajaran Buddhis daripada sepuluh murid utama Shakyamuni. Di antara ajaran-ajaran yang dibabarkan sutra ini adalah gagasan ideal bodhisatwa, yaitu tidak membedakan antara diri sendiri dan orang lain, dan non-dualitas atau kesatuan fenomena yang tampaknya berseberangan seperti hidup dan mati, baik dan jahat.

helai-helai itu tetapi semuanya menempel ke badannya. Melihat ini, sang dewi berkata, “Bunga tidak memiliki kesadaran diskriminatif (membedakan), tetapi Anda membedakan di antara manusia,” dengan demikian menunjukkan kelekatan-kelekatan yang mencengkeram Sariputra.

Sariputra mengakui kebenaran dalam ucapan dewi itu, tetapi ketika Sariputra terus menanyai sang dewi, sang dewi menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengubah Sariputra menjadi sosoknya dan dirinya sendiri menjadi sosok Sariputra. Sang dewi melanjutkan menunjukkan kepada Sariputra yang kebingungan betapa mendalamnya kesadaran diskriminatif yang Sariputra pendam, lalu mengubah mereka kembali lagi ke sosok asal. Melalui urutan peristiwa yang menakjubkan ini, Sariputra menyadari bahwa kita tidak boleh membiarkan hati kita terpukau penampilan luar, dan bahwa segala sesuatunya tidak memiliki bentuk atau karakteristik tetap.

Yang menurut saya penting di sini adalah bagaimana pengalaman bertukar sosok ini memungkinkan Sariputra menyadari dengan jelas pandangan diskriminatif yang selama ini dia tujukan kepada dewi ini, dan bahwa sebagai hasilnya Sariputra mampu menyadari kesalahannya.

Dengan majunya globalisasi, semakin banyak gerakan menyeberangi perbatasan negara-negara, dan banyak orang, dari pengalaman mengunjungi atau tinggal di negara lain, terpaksa mengakui jenis tatapan diskriminatif yang tanpa sadar sudah mereka tujukan pada kelompok-kelompok lain ketika mereka tinggal di negara asal mereka. Maka, manusia benar-benar harus memaksa diri untuk memahami orang lain dan memandang segala sesuatu lewat mata orang lain.

Tanpa upaya seperti itu, khususnya di masa-masa ketegangan meningkat, ide-ide kita sendiri tentang apa yang merupakan perdamaian atau keadilan akan dengan mudahnya berubah menjadi ancaman bagi kehidupan dan martabat orang lain. Inilah sebabnya pembalikan perspektif yang dialami Sariputra penting sekali. Itu membuka mata kita untuk melihat ancaman yang tersirat dalam tatapan yang kita lontarkan pada orang lain. Itu mendorong kita untuk aktif membayangkan ancaman yang orang lain rasakan ditujukan pada mereka dan keluarga mereka, serta mengubah asumsi dan pernyataan kita.

Ketika Sariputra mula-mula didesak oleh Sakyamuni agar menjenguk Vimalakīrti yang sedang sakit, jawaban pertama Sariputra adalah jawaban yang ragu, dan ketika dia tiba bersama Manjushrī, awalnya dia mencemaskan fakta bahwa tidak ada tempat untuk dia duduk. Vimalakīrti sendiri, ketika ditanya penyebab sakitnya oleh Manjushrī, menjawab, “Karena semua makhluk hidup sakit, saya juga sakit.” Lalu Vimalakīrti berkata bahwa tamutamanya, jika mereka benar-benar mengkhawatirkan kesejahteraannya, akan paling baik mengungkapkan kekhawatiran itu dengan merawat dan menyemangati orang lain yang menderita sakit. Demikianlah, ketika Sariputra sibuk memikirkan dirinya sendiri, Vimalakīrti fokus pada realitas penderitaan yang dialami semua orang, tak peduli keadaan dan perbedaan antara diri dan yang lain.

Bila kita lihat kondisi sekarang di dunia lewat lensa kekontrasan yang digambarkan dalam sutra ini, kita dapat memetik pelajaran berikut ini: Walaupun perdamaian dan keadilan seharusnya dirasakan sebagai kebaikan seluruh masyarakat, bila keduanya sampai dianggap sebagai dua hal yang terpisah akibat kecemasan berlebihan pada diri sendiri, perdamaian

dan keadilan bisa saja menjadi dasar untuk membenarkan kekejaman dan penindasan terhadap kelompok lain yang bertikai dengan kita.

Inilah sebabnya meluaskan solidaritas manusia berdasarkan keprihatinan bersama terhadap ancaman yang kita semua hadapi—seperti semakin seringnya peristiwa cuaca ekstrem yang menyertai perubahan iklim atau kerusakan besar-besaran yang disebabkan oleh penggunaan senjata nuklir—memegang kunci untuk meringankan penderitaan manusia.

Satu hal yang siapa pun dari kita dapat lakukan kapan saja untuk menyumbang pada pembangunan solidaritas itu adalah menciptakan jaringan persahabatan yang lebih luas melalui dialog. Dalam perbincangan saya tentang Islam dan Buddhisme dengan mendiang presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (1940-2009), dia menekankan bahwa dialog memberi

Dengan mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan, kita telah menciptakan peluang bagi penduduk berbagai negara dan wilayah untuk bertemu muka, untuk membangun rasa percaya dan mengembangkan persahabatan.

wajah manusia pada orang-orang yang mungkin berasal dari latar belakang etnik, budaya, atau sejarah yang berbeda. Melalui pertemuan dan interaksi berulang, satu sama lain akhirnya terbiasa dengan kisah-kisah kehidupan. Bahkan selagi kita mengakui dan menghargai pentingnya atribut-atribut seperti agama atau etnik, kita tidak membiarkan hal itu menjadi fokus satu-satunya dalam pertemuan kita. Perasaan dan kepercayaan bersama yang dibina lewat pertemuan-pertemuan ini menumbuhkan melode-melodi unik yang hanya dapat dirangkai oleh dua hidup ini. Ini, saya yakin, adalah nilai dan makna



Penulis bertemu dengan presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid di Tokyo, Jepang, April 2002

persahabatan yang sesungguhnya. Atau, seperti kata-kata sejarawan Arnold J. Toynbee (1889-1975), “Kilasan-kilasan dunia nyata seperti itu adalah kumpulan yang tak ternilai harganya.”^[23]

Persahabatan berkembang bebas bila kita menolak untuk terlalu memikirkan atribut masing-masing dan sebaliknya melihat si teman dalam cahaya gemilang kemanusiaan mereka. Dimulai dengan dialog saya dengan Dr. Toynbee 43 tahun yang lalu, sejak itu saya mendapat kehormatan untuk berbincang dengan tokoh-tokoh terkemuka dari banyak latar belakang budaya, etnik, agama, dan bangsa yang berbeda. Benang merahnya selalu adalah keprihatinan bersama mengenai masa depan manusia, dan melalui perbincangan kami itu kami mengembangkan persahabatan yang benar-benar membahagiakan.

Anggota SGI, melalui persahabatan dan pertukaran satu orang-dengan-satu orang, telah bekerja untuk mewujudkan transisi dari suatu budaya perang yang didominasi oleh ideologi pengucilan, menjadi budaya perdamaian tempat perbedaan-perbedaan dirayakan sebagai sumber keragaman manusia

dan ada ikrar bersama untuk membela martabat satu sama lain.

Dengan mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan, kita telah menciptakan peluang bagi penduduk berbagai negara dan wilayah untuk bertemu muka, untuk membangun rasa percaya dan mengembangkan persahabatan. Harapan kita adalah bahwa ikatan persahabatan semacam itu akan menangkal setiap kecenderungan ke arah ideologi xenofobia (rasa benci dan takut terhadap yang serba-asing) yang mungkin muncul, khususnya di masa meningkatnya ketegangan antara negara-negara. Dengan demikian, kita telah berusaha membangun masyarakat yang tangguh dan kebal terhadap kekuatan-kekuatan negatif psikologi kolektif. Bahkan ketika hubungan politik atau ekonomi mendingin, kita bekerja untuk menjaga agar jalur-jalur dialog dan komunikasi tetap terbuka, suatu upaya yang sudah merentang bergenerasi-generasi.

Tahun lalu, Asosiasi Konser Min-On, yang saya bentuk pada tahun 1963, mendirikan Institut Riset Musik Min-On. Berdasarkan lima dasawarsa pengalaman Min-On dalam mempromosikan pertukaran musik dan budaya dengan berbagai kelompok dan lembaga di 105 negara dan wilayah, lembaga riset baru ini akan mengkaji peran dan potensi musik dan seni—kekuatan kebudayaan—dalam menciptakan perdamaian.

Selain itu, melalui acara-acara dialog antar-keyakinan dan lintas-peradaban yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi nasional SGI, kami berusaha menyampaikan pelajaran tentang cara-cara memutus siklus kebencian dan kekejaman yang mendarah daging. Dengan tekad meringankan penderitaan manusia sebagai titik tolak, kami sudah melakukan diskusi-diskusi yang membahas keprihatinan bersama untuk memunculkan kearifan yang dipupuk dalam setiap tradisi budaya dan agama, serta memperjelas norma-norma etika dan perilaku yang dapat mendobrak jalan buntu.

Kata-kata mantan presiden Ceko Vaclav Havel (1936-2011) pada tahun 1996 berikut ini relevan di sini, “Satu-satunya tugas bermakna untuk Eropa abad mendatang adalah menjadi yang sebaik-baiknya, yaitu, membangkitkan kembali dan membubuhi kehidupan Eropa dengan tradisi-tradisi spiritual terbaiknya, sehingga membantu membentuk secara kreatif suatu pola baru

koeksistensi global.”^[24] Di sini, jika “Eropa” itu kita ganti dengan peradaban atau agama kita masing-masing, imbauan Havel menggambarkan sebuah model untuk jenis dialog yang kami upayakan. Melalui dialog, kita berbagi energi vital dari tradisi spiritual terbaik yang kita masing-masing miliki; kita asah visi yang memungkinkan kita merasakan kemanusiaan kita sepenuhnya; kita belajar memulai tindakan bersama dengan dilandasi diri terbaik kita. Inilah makna penting sesungguhnya dalam dialog antar-keyakinan dan lintas-peradaban.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, kita berusaha menolong orang-orang untuk menolak terlibat dalam kekejaman dan penindasan, untuk mempertinggi daya magnet etos koeksistensi dan membangun kubu pertahanan terhadap perang. Kita bekerja untuk menempa solidaritas manusia dengan dilandasi tekad bersama untuk mencegah kesengsaraan yang tidak kita inginkan untuk diri kita sendiri agar tidak menimpa orang lain mana pun.

Dalam Sutra Vimalakīrti, ada satu adegan yang menggambarkan munculnya sebuah kanopi berhias permata yang menaungi seluruh dunia. Lima ratus orang muda berkumpul di sekeliling Sakyamuni, masing-masing memegang payung berhias permata. Kanopi yang sangat megah ini mewujud ketika payung yang dipegang oleh setiap orang muda itu seketika menyatu—melambangkan keinginan mereka untuk menciptakan masyarakat koeksistensi yang damai. Payung mereka masing-masing tidak lagi berfungsi untuk melindungi setiap pemuda itu dari angin dan hujan atau teriknya sinar matahari. Sebaliknya, orang-orang muda ini yang sudah menempuh jalan mereka sendiri-sendiri dalam hidup, bangkit mengatasi perbedaan mereka dalam satu tekad bersama, dan inilah yang mewujudkan kanopi pelindung yang besar ini. Saya rasa ini simbol yang indah tentang tak terbatasnya kemungkinan solidaritas manusia.

Saya yakin bahwa solidaritas seperti itu juga terungkap dalam tujuan-tujuan pembangunan internasional baru yang akan diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa menuju tahun 2030—tekad untuk melindungi kehidupan dan martabat seluruh manusia di Bumi dari setiap bentuk ancaman dan kesengsaraan—dan melalui solidaritas inilah tujuan-tujuan itu akan tercapai.

EVOLUSI KREATIF PBB

Berikutnya, saya ingin mengajukan beberapa proposal spesifik untuk masalah-masalah yang membutuhkan pendekatan kreatif yang melampaui cakupan pemikiran konvensional jika kita ingin menghapuskan kesengsaraan dari muka Bumi.

Bila saya mengenang sejarah 70 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya teringat kata-kata Sekretaris Jenderal kedua Dag Hammarskjöld (1905-61) dalam laporan tahunannya pada tahun 1960:

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah ciptaan organik dari situasi politik yang dihadapi generasi kita. Tetapi, pada saat yang sama, boleh dibilang komunitas internasional sudah mencapai kesadaran-diri politis di dalam organisasi ini dan, karena itu, dapat menggunakan kesadaran itu dengan cara yang bermakna untuk memengaruhi keadaan-keadaan yang melahirkan organisasi ini.^[25]



Dag Hammarskjöld di Pusat PBB, Maret 1960

UN Photo/MB

Meski dengan kekangan dan keterbatasan struktural yang dihadapi sebagai organisasi yang terdiri dari negara-negara berdaulat, selama ini PBB telah memupuk dan membina kesadaran-diri komunitas internasional, dan inilah yang dapat memberinya daya dorong untuk memenuhi misi awalnya.

Sesungguhnya, melalui upaya-upaya untuk mewujudkan semangat Piagam, PBB telah memengaruhi kebijakan pemerintah-pemerintah dengan memaparkan dengan jelas seperangkat prinsip yang tidak boleh digoyahkan oleh negara mana pun. Salah satu contohnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR, Universal Declaration of Human Rights).

Jacques Maritain (1892-1973), filosof Perancis yang sangat terlibat dalam proses penyusunan draf UDHR, menekankan bahwa orang-orang yang saling bertentangan konsepsi teoretisnya dapat satu suara dalam suatu kesepakatan praktis mengenai sebuah daftar hak-hak asasi manusia.^[26] Para penyusun draf UDHR tidak akan bisa mencapai konsensus dengan

PENYUSUNAN DRAF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA

Setelah Perang Dunia II berakhir dan masih gamang dari kekejaman perang itu, komunitas internasional memutuskan untuk membuat sebuah dokumen yang akan memerinci dan menjamin hak asasi serta kebebasan setiap individu di mana pun, kapan pun. Tugas ini mulai dibicarakan dalam sesi pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1946, dan pekerjaan menyusun draf Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dipercayakan kepada sebuah panitia penyusun resmi yang diketuai Eleanor Roosevelt. Panitia penyusun ini terdiri atas anggota-anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari delapan negara, dengan memperhitungkan distribusi geografis mereka. Selama dua tahun proses penyusunan draf, masukan dan inspirasi juga diminta dari pemikir-pemikir terkemuka yang mewakili beraneka ragam nilai, sistem kepercayaan, dan ideologi politik dari berbagai kebudayaan dan masyarakat di seluruh dunia.

UDHR diadopsi oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948, dan, hari ini, tersedia dalam 440 bahasa.

menyeberangi perbedaan-perbedaan asumsi ideologi dan budaya mereka seandainya bukan karena kekuatan platform bersama yang disediakan oleh PBB.

Tahun demi tahun, PBB telah mengarahkan perhatian publik pada masalah-masalah yang mendesak dengan merumuskan konsep-konsep seperti pembangunan berkelanjutan dan keselamatan manusia, serta dengan menetapkan Tahun-Tahun Internasional dan Dasawarsa-Dasawarsa PBB. Badan ini juga telah menggalang langkah-langkah internasional untuk menangani kekerasan terhadap wanita dan buruh anak, dua-duanya masalah serius yang mungkin tidak mendapat perhatian yang memadai dalam konteks domestik.

Cakupan perlindungan yang menjamin nyawa dan martabat manusia terus-menerus diperluas, sehingga hukum internasional berlaku tidak hanya untuk negara tetapi juga individu dengan dibangunnya “konsensus yang saling melengkapi” tentang isu-isu itu, dan memusatkan perhatian pada persoalan yang dihadapi golongan yang tertindas. Saya yakin hanya PBB yang dapat memainkan peran yang tak tergantikan seperti itu.

Dalam mengadopsi seperangkat tujuan pembangunan baru untuk menangani tantangan yang kita hadapi dengan tugas yang lebih ambisius daripada tugas MDG, kita semestinya bekerja bersama menuju evolusi kreatif PBB, dengan semangat mengatasi persoalan-persoalan kita “tanpa membatasi diri dengan keyakinan-keyakinan yang diwariskan pendahulu ataupun rumus-rumus yang tetap”^[27] seperti kata-kata Hammarskjöld.

Dalam peristiwa yang dapat menjadi penanda dimulainya upaya-upaya itu, peresmian Majelis Lingkungan Hidup PBB dilangsungkan di Nairobi, Kenya, pada Juni 2014 dengan diikuti seluruh negara anggota sebagai bagian dari reformasi struktural Program Lingkungan PBB (UNEP). Acara ini dihadiri oleh sejumlah besar pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk wakil organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam masalah-masalah lingkungan, juga wakil-wakil komunitas bisnis.

Saya selama ini konsisten menekankan dua prasyarat untuk

memecahkan persoalan-persoalan global: partisipasi semua negara, dan kolaborasi antara PBB dan masyarakat sipil. Tindakan bersama harus dikembangkan dengan ditopang oleh dua pilar ini untuk menghadapi tidak hanya tantangan-tantangan lingkungan tetapi juga segala macam ancaman terhadap kehidupan dan martabat manusia. Ini, saya yakin, seharusnya berada di jantung evolusi kreatif Perserikatan Bangsa-Bangsa saat badan ini menandai hari jadinya ke-70 tahun ini.

Mengenai misi PBB, saya ingin mengajukan usulan spesifik di tiga bidang berikut ini, yang saya rasa sangat membutuhkan tindakan bersama untuk menghapus kata kesengsaraan dari kosakata manusia:

1. Perlindungan hak asasi pengungsi dan migran internasional;
2. Pelarangan dan penghapusan senjata nuklir; serta
3. Terwujudnya masyarakat global yang berkelanjutan.

MELINDUNGI HAK ASASI PENGUNGI

Bidang pertama untuk tindakan bersama adalah melindungi hak asasi pengungsi dan migran internasional. Saya ingin mengusulkan agar dimasukkan juga perlindungan spesifik untuk hak asasi dan martabat orang-orang seperti ini dalam SGD yang dijadwalkan akan diadopsi oleh Majelis Umum musim gugur ini.

Seperti yang sudah saya sebutkan, yang ada dalam pikiran guru saya Josei Toda ketika beliau mengungkapkan keinginan beliau untuk menghapuskan kesengsaraan dari dunia adalah pengungsi yang begitu banyak serta penderitaan mereka yang tak terlukiskan setelah pemberontakan Hungaria pada tahun 1956.

Ahli teori politik Hannah Arendt (1906-75) adalah orang yang menyebut abad ke-20 sebagai abad pengungsi. Dia menulis:

Sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada kebebasan dan keadilan, yang merupakan hak asasi warga negara, dipertaruhkan ketika status sebagai anggota komunitas tempat seseorang lahir

bukan lagi suatu kepastian, dan tidak menjadi anggota bukan lagi masalah pilihan.^[28]

Fondasi martabat manusia adalah adanya sebuah dunia tempat mereka dapat sepenuhnya merasakan dan mengungkapkan identitas mereka—terputus dari dunia itu berikut semua hak asasi manusia yang terkait dengan dunia itu adalah sumber penderitaan para pengungsi.

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) awalnya dibentuk pada tahun 1950 sebagai badan sementara dengan mandat melindungi para pengungsi di Eropa sesudah Perang Dunia II. Selain banjir pengungsi yang dipicu oleh pemberontakan Hungaria, krisis-krisis pengungsi lain terjadi di Asia, Afrika, dan bagian-bagian lain dunia, sehingga mandat UNHCR harus berulang kali diperluas. Pada tahun 2003, Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menghapus “pembatasan sementara pada kelanjutan Kantor ini ... sampai persoalan pengungsi diselesaikan.”^[29]

UNHCR telah memberikan kontribusi besar dalam membantu pengungsi, dan SGI bekerja mendukung kegiatan-kegiatan ini dengan berbagai cara. Tetapi, persoalan pengungsi tetap belum terselesaikan di dunia yang semakin kacau balau sekarang ini—total ada 51,2 juta orang yang sekarang menjadi pengungsi, pengungsi dalam negeri, atau pencari suaka, dan setengah dari mereka berusia di bawah 18 tahun.^[30]

Yang menjadi keprihatinan khusus adalah situasi pengungsi yang berlarut-larut, ketika orang terpaksa mengungsi dari negara asal mereka selama lima tahun atau lebih. Orang seperti itu membentuk lebih dari setengah pengungsi yang tercakup dalam mandat UNHCR, dengan periode pengungsian rata-rata sekitar 20 tahun.^[31] Ini berarti bahwa tidak hanya individu-individu ini, tetapi juga anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka mungkin terpaksa hidup dalam keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang sangat tidak stabil.

Yang sama mengkhawatirkan adalah persoalan tidak memiliki kewarganegaraan, yang diperkirakan dialami lebih dari 10 juta orang di

seluruh dunia.^[32] Tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak bisa mendapat layanan seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, atau dalam beberapa kasus terpaksa menyembunyikan status dan hidup dalam bayang-bayang demi melindungi keluarga. Semakin banyak anak-anak yang orangtuanya melarikan diri dari kekerasan dan penindasan hak asasi manusia dilahirkan tanpa memiliki kewarganegaraan, tanpa akses ke dokumen legal. Pada November 2014, UNHCR meluncurkan kampanye global untuk menghapus status tidak berkewarganegaraan dalam sepuluh tahun ke depan.

Dalam karyanya pada tahun 1903 *Geografi Kehidupan Manusia*, Tsunesaburo Makiguchi mengajukan bahwa identitas manusia dapat dikembangkan pada tiga level: sebagai warga suatu komunitas lokal tempat kehidupan mereka mengakar, sebagai warga suatu komunitas negara dan di dalam batas-batas negara itulah kehidupan sosial mereka berlangsung, dan sebagai warga suatu komunitas global dengan kesadaran akan hubungan mereka dengan dunia. Beliau menekankan bahwa potensi unik individu itu dapat terungkap paling kaya bila kita mengembangkan sepenuhnya jenis identitas berlapis-lapis ini.

Dalam pengertian ini, situasi pengungsi berkepanjangan dan tidak memiliki kewarganegaraan tidak hanya menghapus kesempatan individu-individu itu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial negara itu, mereka juga tidak dapat membangun ikatan dengan tetangga mereka dalam komunitas lokal dan mengambil tindakan bersama



Tsunesaburo Makiguchi

dengan penduduk negara-negara lain menuju terciptanya jenis dunia yang ingin mereka tinggali. Dengan kata lain, mereka tidak diberi kesempatan untuk menjadi diri mereka sepenuhnya.

Meletakkan peringanan penderitaan orang-orang seperti itu sebagai tujuan utama evolusi kreatif Perserikatan Bangsa-Bangsa memang perlu dilakukan jika tercakupnya “semua orang di mana pun”—yang diupayakan dalam SDG yang baru—akan diwujudkan. Dan ini sepenuhnya sejalan dengan gagasan ideal hak asasi manusia universal yang begitu dicita-citakan UDHR.

Sama seperti itu, situasi hak asasi manusia yang dialami 232 juta migran internasional menuntut perhatian mendesak.

Di negara-negara yang mengalami resesi ekonomi berkepanjangan dan peningkatan keresahan sosial, ada kecenderungan yang semakin besar untuk memandang negatif pekerja migran serta bersikap diskriminatif dan bermusuhan kepada mereka dan keluarga mereka. Akibatnya, kesempatan mereka untuk mendapat pekerjaan tetap dan hak mereka untuk mendapat pendidikan dan perawatan medis mungkin jadi sangat terbatas, dan sering sekali masyarakat menutup mata terhadap perlakuan tidak adil yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Karena pekerja migran dan keluarga mereka menjadi semakin terpinggirkan dan terkucil, PBB sudah memulai upaya untuk melawan kesalahpahaman dan prasangka. Dalam Dialog Tingkat Tinggi Membahas Migrasi dan Pembangunan Internasional yang diadakan pada Oktober 2013, pemerintah-pemerintah sepakat bahwa hubungan penting migrasi dengan pembangunan harus tecermin dalam SDG yang baru.

Di sini, saya ingin mengusulkan agar masalah ini dipertimbangkan tidak hanya dalam konteks pembangunan; agar tujuan melindungi martabat dan hak asasi mendasar para pekerja migran dan keluarga mereka secara eksplisit dimasukkan dalam SDG dengan penekanan pada meringankan penderitaan yang mereka hadapi.

Kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk melindungi migran internasional harus diperkuat. Ini tidak terbatas pada kerangka kerja yang sudah ada tetapi harus meliputi: yaitu Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Asasi Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (yang diadopsi pada Desember 1990 tetapi baru disahkan oleh sejumlah negara yang terbatas) serta Agenda Pekerjaan yang Layak yang dikembangkan oleh Organisasi Buruh Internasional.

Lebih jauh saya ingin mengusulkan pengembangan mekanisme bagi negara-negara yang bertetangga agar mereka dapat bekerja sama untuk memberdayakan para pengungsi, khususnya di wilayah-wilayah yang sudah menerima pengungsi dalam jumlah besar.

Selain konflik bersenjata, di tahun-tahun terakhir ini bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem telah memaksa banyak orang untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan. Dalam konteks ini, saya ingin mengarahkan perhatian pada konsultasi-konsultasi regional yang mendahului Pertemuan Tingkat Tinggi Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian Summit) yang akan diadakan di Istanbul, Turki, pada tahun 2016. Pertemuan tingkat tinggi itu bertujuan mengkaji cara-cara terbaik bagi komunitas

Orang-orang yang pernah mengalami sendiri penderitaan yang begitu berat bisa lebih memahami dan ikut merasakan kepiluan mereka yang terkena bencana.

Jaringan empati seperti itu dapat menjadi dukungan yang tak ternilai bagi orang-orang yang sedang kesulitan.

global untuk berhimpun dan membahas krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik, kemiskinan, bencana alam, dan peristiwa cuaca ekstrem.

Konsultasi regional yang diselenggarakan pada Juli 2014 di Tokyo memberi penekanan khusus pada tindakan tanggap bencana. Pentingnya memastikan bahwa mereka yang terkena dampak bencana diberi peran utama dalam proses kemanusiaan juga selalu ditekankan, begitu pula perlunya menggenjot usaha ke arah pemberdayaan mereka agar mereka dapat hidup bermartabat.

Ini pula pendekatan yang selama ini diambil SGI dalam membantu pemulihan komunitas-komunitas yang terkena bencana alam. Orang-orang yang pernah mengalami sendiri penderitaan yang begitu berat bisa lebih memahami dan ikut merasakan kepiluan mereka yang terkena bencana. Jaringan empati seperti itu dapat menjadi dukungan yang tak ternilai bagi orang-orang yang sedang kesulitan, dan menumbuhkan dari dalam diri mereka kemauan untuk melangkah maju.

Konferensi Dunia Ketiga PBB tentang Pengurangan Risiko Bencana dijadwalkan diadakan di Sendai di timur laut Jepang pada Mei 2015, hari jadi keempat gempa bumi dan tsunami 11 Maret 2011. Di antara acara-acara tambahan, SGI akan ikut mensponsori simposium tentang “Meningkatkan Resiliensi di Asia Timur Laut melalui Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana,” tempat wakil-wakil masyarakat sipil dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk memperdalam kolaborasi di bidang pencegahan bencana dan pemulihan. Anggota generasi muda Soka Gakkai lokal juga akan mengadakan simposium tentang pengurangan risiko bencana serta peran orang muda, dan akan berpartisipasi dalam diskusi-diskusi tentang peran organisasi berbasis keyakinan dalam pengurangan risiko bencana.

Acara-acara ini akan terfokus pada pemberdayaan orang-orang yang terkena bencana agar mereka dapat memainkan peran utama dalam meningkatkan resiliensi masyarakat. Ini sama pentingnya dengan upaya untuk memastikan martabat dan hak asasi pengungsi karena semakin banyak pengungsi yang mendapati diri mereka berada dalam situasi mengungsi

yang berkepanjangan. Sifat dasar penderitaan yang dialami orang-orang dalam berbagai krisis kemanusiaan tetap sama, apa pun penyebabnya: Mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, fondasi kehidupan mereka hancur. Yang paling penting adalah bagaimana individu-individu itu dapat menemukan sumber harapan baru.

Fakta bahwa lebih dari 80 persen pengungsi dunia diterima oleh negara-negara berkembang semakin mempertinggi relevansi langkah-langkah yang diambil di Afrika untuk menangani masalah pengungsi yang berlarut-larut. Upaya untuk membangun kerangka kerja untuk kerja sama regional sudah dilakukan melalui Uni Afrika (AU) dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS, Economic Community of West African States).

Ada riset menarik yang menyatakan bahwa, sebagai jawaban terhadap situasi pengungsi yang berkepanjangan di Afrika, terlihat kemajuan dalam “integrasi de facto”, yang didefinisikan sebagai keadaan ketika orang-orang (1) tidak menghadapi risiko deportasi, (2) tidak terkungkung di kamp-kamp, (3) mampu mempertahankan mata pencaharian dan menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, (4) mempunyai akses ke pendidikan, pelatihan profesi, dan perawatan kesehatan, serta (5) secara sosial terjalin ke dalam komunitas penerima mereka melalui upacara-upacara seperti pernikahan dan pemakaman. Riset ini menunjukkan bahwa jenis “integrasi de facto” ini dapat diamati di beberapa wilayah pertanian.^[33]

Mengikuti seruan yang dikeluarkan Dewan Menteri ECOWAS pada Mei 2008 agar diberlakukan perlakuan yang setara antara pengungsi dan warga negara ECOWAS lainnya, untuk para pengungsi yang tinggal di Nigeria dan tempat-tempat lain itu telah diterbitkan paspor oleh negara asal mereka. Hasilnya, banyak dari mereka mampu menetapkan status baru sebagai pekerja migran, sehingga membuka jalan bagi mereka untuk secara resmi menetap di negara tuan rumah.

Penulis Nigeria Wole Soyinka, yang dengan penuh hormat saya anggap teman, menyatakan bahwa menggunakan imajinasi untuk meletakkan diri kita di posisi orang lain adalah fondasi keadilan.^[34] Saya rasa salah satu kunci menuju pemecahan masalah pengungsi dapat ditemukan dalam semangat

Afrika ini, sebuah benua dengan sejarah panjang pergerakan di antara manusia dan tradisi toleransi terhadap orang dari kebudayaan berbeda.

Di sini saya diingatkan pada kunjungan pertama saya ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, pada Oktober 1960. Karena sangat terkesan oleh energi segar para wakil dari negara-negara Afrika yang baru merdeka, saya yakin bahwa abad ke-21 akan menjadi abad Afrika.

Perjuangan untuk hak asasi manusia yang dilakukan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dan gerakan penanaman pohon yang dipimpin oleh pegiat lingkungan Kenya Wangari Maathai (1940-2011) memberikan contoh prakarsa terobosan yang dapat menandai datangnya abad ke-21, abad perdamaian dan kemanusiaan, yang bermula di Afrika.

Meski menghadapi banyak tantangan, negara-negara Afrika terus-menerus mengkaji berbagai cara untuk mengatasi persoalan pengungsian terpaksa (forced displacement) melalui kerja sama regional. Selagi PBB bersiap mengadopsi perangkat tujuan pembangunan baru, kearifan dan pengalaman Afrika dapat, seperti kata-kata pegiat anti-apartheid Afrika Selatan Steve Biko (1946-77), berkontribusi untuk “memberi dunia wajah yang lebih manusia.”^[35]

Saya ingin menyerukan kerja sama regional yang lebih luas—mengikuti teladan Afrika—di wilayah Asia-Pasifik, yang menampung sejumlah besar pengungsi, dan di Timur Tengah, tempat terjadi peningkatan tajam jumlah pengungsi akibat perang saudara Suriah.

Sebagai satu unsur dari prakarsa-prakarsa itu, saya ingin menyarankan agar negara-negara penampung pengungsi yang bertetangga bekerja sama untuk memajukan pemberdayaan pengungsi. Khususnya, saya ingin mengusulkan program-program pemberdayaan gabungan yang bersifat regional. Melalui program-program ini berbagai proyek pendidikan dan bantuan pekerjaan akan mencakup baik populasi pengungsi maupun para pemuda dan wanita negara penampung. Ini akan membuka kesempatan bagi anggota populasi pengungsi dan negara penampung untuk mengembangkan ikatan yang lebih dalam, sehingga menciptakan kerangka kerja yang

berkelanjutan untuk menyokong pengungsi dan meningkatkan resiliensi wilayah itu secara keseluruhan.

MENGHAPUS SENJATA NUKLIR

Bidang kedua untuk tindakan bersama yang ingin saya bahas adalah menuju terwujudnya dunia tanpa senjata nuklir.

Resolusi pertama yang diterima pada Januari 1946 dalam sesi pertama Majelis Umum PBB yang baru dibentuk membahas persoalan senjata atom. Selama proses penyusunan draf Piagam PBB, keberadaan senjata atom belum menjadi pengetahuan publik, dan diskusi-diskusi lebih terfokus pada pengamanan, bukan pelucutan. Tetapi, sebulan lebih sedikit setelah Piagam PBB diadopsi di akhir Juni 1945, bom-bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika berita tentang peristiwa mengejutkan ini menyebar ke seluruh dunia, semakin banyak seruan mendesak agar PBB cepat menanggapi tantangan baru ini.

Melalui resolusi itu, yang menyerukan “penghapusan dari persenjataan nasional senjata-senjata atom dan semua senjata besar lain yang dapat disesuaikan untuk pemusnahan massal,”^[36] Majelis Umum dengan suara bulat meminta penghapusan seluruh senjata jenis itu, tanpa kecuali.

Seruan ini nyaris terlupakan di tengah ketegangan Perang Dingin yang terus meningkat. Tetapi, Seruan Stockholm tahun 1950 berhasil mengumpulkan jutaan tanda tangan dari seluruh dunia dan konon berdampak pada keputusan untuk tidak memakai senjata nuklir dalam Perang Korea, sementara Konferensi Pugwash mengenai Sains dan Urusan Dunia dibentuk pada tahun 1957 oleh ilmuwan-ilmuwan dari kedua pihak Timur-Barat untuk membahas ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Ini dan upaya-upaya masyarakat sipil lainnya menciptakan momentum untuk kerangka kerja legal internasional mengenai senjata nuklir.

Digabung dengan pelajaran-pelajaran dari insiden seperti Krisis Misil Kuba tahun 1962, yang membawa dunia ke ambang perang nuklir, upaya ini akhirnya melahirkan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT, Non-

Proliferation of Nuclear Weapons), yang mulai diberlakukan pada tahun 1970. Para penanda tangan NPT mengikatkan diri untuk tulus mengejar pelucutan nuklir, proyek yang belum rampung yang mula-mula dibicarakan oleh PBB pada saat pembentukannya. Tetapi sekarang, 45 tahun sesudah perjanjian itu mulai berlaku, penghapusan senjata nuklir belum terwujud dan kemajuan dalam pelucutan mandek.

Belum lama ini, gerakan yang menghendaki dunia tanpa senjata nuklir mengambil bentuk baru. Oktober lalu, total 155 negara dan daerah menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Konsekuensi Kemanusiaan dari Senjata Nuklir. Melalui pernyataan ini, lebih dari 80 persen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jelas mengungkapkan keinginan bersama mereka bahwa senjata nuklir tidak akan pernah digunakan dalam keadaan apa pun.

Konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir sekarang menjadi tema tiga konferensi internasional besar, dimulai dengan Konferensi tentang Dampak Kemanusiaan dari Senjata Nuklir pada Maret 2013 di Oslo, Norwegia, diikuti oleh konferensi internasional di Nayarit, Meksiko, dan yang paling akhir di Wina, Austria, bulan lalu.

Di antara temuan-temuan yang terungkap dalam rangkaian konferensi ini, saya yakin tiga poin berikut ini khususnya penting:

1. Kecil kemungkinan bahwa ada negara atau badan internasional yang mampu mengatasi secara memadai keadaan darurat kemanusiaan yang disebabkan oleh peledakan senjata nuklir dan memberikan bantuan yang cukup kepada mereka yang terkena dampak.
2. Dampak peledakan senjata nuklir tidak akan terhalang oleh perbatasan negara, akan menyebabkan efek jangka panjang yang meluluhlantakkan, dan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia.
3. Efek tidak langsung peledakan akan meliputi terhambatnya

pembangunan sosioekonomi serta gangguan ekologis, dan efek itu akan paling terkonsentrasi pada kaum miskin dan rentan.

Dalam Konferensi Wina, Amerika Serikat dan Inggris—dua-duanya berpartisipasi untuk pertama kalinya—secara terbuka mengakui perdebatan pelik yang tengah dilakukan mengenai konsekuensi kemanusiaan dari senjata nuklir. Seperti yang ditunjukkan hal ini, efek penggunaan senjata nuklir apa pun adalah sedemikian rupa sehingga realitasnya harus dihadapi oleh semua, termasuk negara-negara senjata nuklir.

Namun, ketika sampai pada masalah bagaimana melanjutkan dari sini, pendapat-pendapat terbelah. Mayoritas peserta konferensi berpandangan bahwa satu-satunya cara yang pasti untuk menghindari konsekuensi mengerikan dari penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan senjata itu. Sebaliknya, di antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan sekutu-sekutu mereka, ide yang mengakar kuat adalah bahwa kebijakan penghindaran (yakni menggunakan ancaman militer sebagai cara untuk mencegah krisis internasional) harus dipertahankan dan cara terbaik untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir adalah melalui proses langkah-demi-langkah yang bertahap.

Walaupun jurang antara dua posisi ini kelihatannya besar, sesungguhnya keduanya dihubungkan oleh batuan dasar berupa keprihatinan bersama mengenai dampak merusak dari senjata nuklir. Ini keprihatinan yang dirasakan baik oleh yang sudah menandatangani Pernyataan Bersama itu maupun yang belum. Karena itu, saya yakin bahwa keprihatinan ini harus dimanfaatkan sebagai titik tolak kita dalam mencari tindakan bersama menuju dunia yang bebas senjata nuklir.

Berdasarkan pemahaman ini, negara-negara senjata nuklir harus mempertimbangkan jenis prakarsa apa yang diperlukan untuk mencegah kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki, tidak hanya untuk diri mereka sendiri dan sekutu-sekutu mereka, tetapi untuk semua negara. Di sini, saya ingin menelaah dari berbagai perspektif sifat tidak manusiawi senjata nuklir di luar kemampuan merusaknya. Aspek-aspek inilah yang membedakan senjata nuklir dan membuat senjata ini secara mendasar berbeda dengan

bentuk-bentuk persenjataan lainnya.

Aspek pertama yang ingin saya telaah berkaitan dengan parahnya dampak senjata nuklir—apa yang mampu senjata ini musnahkan dalam sekejap.

Saya sangat tergugah oleh kata-kata berikut ini yang dimuat dalam Laporan dan Ikhtisar Temuan Konferensi Wina, “Seperti kasus penyiksaan, yang menginjak kemanusiaan dan sekarang tidak dapat diterima siapa pun, penderitaan yang disebabkan oleh penggunaan senjata nuklir tidak hanya merupakan urusan legal, tetapi menuntut penilaian moral.”^[37] Seruan ini mengulangi poin yang guru saya, Josei Toda, tekankan dalam deklarasi yang menyerukan penghapusan senjata nuklir yang beliau sampaikan pada September 1957, di masa ketika ketegangan Perang Dingin meningkat dan lomba senjata nuklir semakin terpacu. Dalam deklarasi itu, Toda mendesak:

Walaupun gerakan yang menyerukan pelarangan uji coba senjata atom atau nuklir telah bangkit di seluruh dunia, harapan saya adalah melangkah lebih jauh, untuk menyerang masalah ini di akarnya. Saya ingin membongkar dan mencabut keluar cakar-cakar yang tersembunyi di relung-relung senjata itu.^[38]

Buddhisme mengajarkan bahwa ancaman paling serius terhadap martabat manusia adalah kejahatan yang muncul dari kesesatan pokok yang

RAJA IBLIS SURGA KEENAM

Surga Keenam dalam Dunia Hawa Nafsu, yang juga dikenal sebagai Surga Bebas Menikmati Segala yang Dikhayalkan Orang Lain, adalah surga yang tertinggi, terletak di Dunia Hawa Nafsu dalam kosmologi Buddhis. Di sinilah paranirmitavasavarti-deva, si raja iblis surga keenam, bermukim, dengan mengisap daya hidup makhluk lain dan mengambil keuntungan dari upaya-upaya mereka. Konon ia mengganggu para pelaksana Buddhisme untuk membujuk mereka agar tidak melakukan praktik dan menghalangi mereka mencapai pencerahan.

inheren dalam semua kehidupan dan dikenal sebagai paranirmitavasavarti-deva atau raja iblis surga keenam. Ini adalah keadaan yang menunjukkan kebersediaan untuk mengecilkan eksistensi setiap individu hingga menjadi tidak berarti, dan merampok makna paling hakiki dari hidup. Toda menegaskan bahwa yang tersembunyi di relung-relung senjata nuklir adalah bentuk kejahatan yang paling ekstrem ini.

Karena itu, beliau mendesak bahwa kita harus melampaui pelarangan uji coba senjata nuklir dan menolak logika penghindaran dengan nuklir, yang dasarnya adalah kesiapan mengorbankan nyawa manusia dalam jumlah besar. Inilah solusi mendasar untuk ancaman senjata nuklir dan harus dikejar atas nama hak seluruh penduduk dunia untuk hidup.

Dr. Joseph Rotblat (1908-2005), yang sudah lama memainkan peran sentral dalam Konferensi Pugwash—yang dibentuk pada tahun 1957, tahun yang sama Toda mengeluarkan deklarasi ini—pernah menyampaikan kepada saya penilaian berikut ini:

Ada dua pendekatan terhadap senjata nuklir yang selama ini diambil. Yang satu adalah pendekatan legal, dan yang kedua adalah pendekatan moral. Bapak Toda, sebagai orang yang religius, mengambil pendekatan terakhir ini.^[39]

Ada larangan normatif yang mutlak terhadap penyiksaan, yang menganggap tindakan itu tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Sama seperti itu, sudah tiba waktunya untuk menantang senjata nuklir dari perspektif moral.

Sesudah Perang Dunia II, dengan mengikuti langkah A.S., Uni Soviet berhasil mengembangkan senjata-senjata nuklir; Inggris, Perancis, dan Tiongkok pun mengekor. Proliferasi atau penyebarluasan senjata nuklir terus berlanjut bahkan sesudah NPT diberlakukan, dan kebuntuan nuklir global akhirnya dianggap sebagai realitas yang tak bisa diubah dan tak bisa disingkirkan di dalam komunitas internasional. Yang mendasari keadaan ini adalah kebijakan penghindaran dengan nuklir, yang, jika disusutkan ke pengertiannya yang paling sederhana, menerima kemungkinan pemusnahan

populasi musuh meski mengalami kerusakan luas sebagai gantinya.

Seperti yang dipaparkan Toda, ini melampaui perbedaan apa pun antara teman atau lawan, dalam sekejap menihilkan semua pencapaian masyarakat dan peradaban, menghapus bukti tiap-tiap kehidupan kita, melucuti makna seluruh keberadaan.

Masaaki Tanabe, yang memimpin proyek mencipta ulang gambar-gambar Hiroshima seperti keadaannya sebelum dijatuhi bom atom, menyatakan, “Ada hal-hal yang bagaimanapun juga tidak dapat diciptakan kembali bahkan dengan teknologi grafika komputer yang paling maju.”^[40] Kata-katanya dengan jelas menggambarkan sifat tak tergantikannya sesuatu yang sudah hilang.

Dunia yang berjalan dengan kebijakan penghindaran dengan nuklir—dunia yang dikuasai prospek kehancuran yang sudah membayang—membuat segalanya rapuh dan tak pasti. Kekonyolan situasi ini melahirkan nihilisme yang efeknya sangat korosif pada masyarakat dan peradaban manusia. Ini tidak bisa ditoleransi.

Selain itu, seperti yang dibahas dalam Konferensi Wina pada Desember 2014, selalu ada bahaya terjadi peledakan nuklir yang tak disengaja akibat kekeliruan manusia atau kesalahan teknis, atau karena serangan siber (dunia maya). Bukan hanya persoalan ini tidak diantisipasi oleh teori penghindaran, ini bahaya yang peningkatannya berbanding lurus dengan jumlah negara yang menganut atau mempertahankan kebijakan penghindaran dengan nuklir.

Selama Krisis Misil Kuba, para pemimpin AS dan Uni Soviet mempunyai waktu 13 hari mencari cara-cara untuk meredakan krisis itu. Sekarang, jika sebuah misil yang membawa hulu ledak nuklir tidak sengaja diluncurkan, mungkin hanya ada waktu 13 menit sebelum misil itu menghantam targetnya. Melarikan diri atau evakuasi akan mustahil, dan kota yang menjadi sasaran berikut penduduknya akan hancur lebur.

Tak peduli sebanyak apa upaya yang sudah dikerahkan manusia

untuk menjalani kehidupan yang bahagia, dan tak peduli sudah berapa lama kebudayaan dan sejarah mereka berkembang, semua ini akan dibuat tak berarti dalam sekejap. Dalam kekonyolan yang keterlaluhan inilah sifat tidak manusiawi senjata nuklir ditemukan, jauh dari ukuran-ukuran kekuatan destruktifnya yang amat besar.

Aspek kedua dari tidak manusiawinya senjata nuklir yang ingin saya telaah adalah gangguan struktural yang disebabkan oleh pengembangan dan modernisasi senjata nuklir yang terus-menerus.

Dalam Konferensi Wina, untuk pertama kalinya dampak uji coba nuklir dimasukkan dalam agenda. Istilah hibakusha dewasa ini dipakai untuk semua orang yang pernah mengalami keracunan radiasi akibat senjata nuklir, dan ini tentu saja mencakup juga mereka yang terkena dampak lebih dari 2.000 uji coba nuklir yang selama ini dilakukan di seluruh dunia.

Menurut perkiraan, Republik Kepulauan Marshall mengalami dampak yang setara dengan 1,6 bom ukuran Hiroshima setiap hari sepanjang periode 12 tahun dilakukannya uji coba nuklir.^[41] Fakta ini membuktikan



Uji coba nuklir di Republik Kepulauan Marshall, Juli 1946

efek aktual yang ditimbulkan oleh kebijakan penghindaran dengan nuklir meski kebijakan itu mengaku sudah mencegah penggunaan senjata nuklir. Berarti, kebijakan penghindaran dengan nuklir—yang menyambut ancaman dengan ancaman—telah menyulut lomba senjata nuklir yang menghasilkan sejumlah besar pengujian senjata nuklir, sehingga menciptakan, seperti kata-kata Menteri Urusan Luar Negeri Kepulauan Marshall Tony deBrum, “beban yang tidak semestinya dipikul oleh negara mana pun, dan bangsa mana pun.”^[42]

Sejak diadopsinya Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) pada tahun 1996, jumlah uji coba yang melibatkan ledakan nuklir turun drastis hingga hampir nol. Tetapi, fakta bahwa CTBT belum diberlakukan resmi meski sudah ada 183 tanda tangan membuat moratorium de facto ini rapuh.

Lagi pula, CTBT tidak melarang modernisasi senjata nuklir, dan selama kebijakan penghindaran dengan nuklir bertahan, ada insentif struktural bagi suatu negara untuk mengikuti modernisasi yang dilakukan negara lain dengan upaya-upaya modernisasinya sendiri. Pengeluaran tahunan yang berkaitan dengan senjata nuklir, yang sudah mencapai US\$105 miliar di seluruh dunia, diperkirakan akan meningkat lagi.^[43] Seandainya jumlah yang amat besar ini ditujukan untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan di negara-negara nuklir dan membantu negara-negara berkembang yang penduduknya terus berjuang melawan kemiskinan dan kelangkaan, kehidupan dan martabat begitu banyak orang dapat ditingkatkan.

Berlanjutnya pengembangan senjata nuklir tidak hanya bertentangan dengan semangat Pasal 26 Piagam PBB, yang menyerukan “sesedikit mungkin mengalihkan sumber daya manusia dan ekonomi dunia untuk persenjataan,” tetapi juga menyebabkan dilanggengkannya tatanan global yang timpang dan tidak manusiawi, ketika orang-orang yang kehidupannya sebenarnya bisa dengan mudah ditingkatkan terpaksa terus hidup dalam kondisi yang berbahaya dan merendahkan.

Aspek ketiga dari tidak manusiawinya senjata nuklir yang ingin saya singgung adalah bahwa dipertahankannya suatu sikap nuklir membuat

negara-negara terkunci dalam ketegangan militer yang tak putus-putus.

Dalam Konferensi Tinjauan NPT tahun 2010, sebagai salah satu butir yang harus segera dilaksanakan, negara-negara senjata nuklir berkomitmen untuk “lebih jauh lagi mengurangi peran dan signifikansi senjata nuklir dalam semua konsep, doktrin, dan kebijakan militer dan keamanan.”^[44] Mereka melaporkan kemajuan mereka tahun lalu, tetapi tidak banyak perubahan nyata. Banyak pemimpin negara senjata nuklir mengakui bahwa sulit sekali membayangkan situasi-situasi yang memaksa digunakannya senjata nuklir, dan bahwa sebagian besar ancaman yang mutakhir bersifat tidak dapat dihadapi dengan senjata nuklir. Namun, kepatuhan pada kebijakan penghindaran dengan nuklir menghalangi dipenuhinya komitmen pelucutan ini.

Pada titik ini, mungkin sulit bagi negara-negara senjata nuklir untuk sepenuhnya membebaskan diri dari kekhawatiran bahwa mereka atau sekutu-sekutu mereka akan terancam serangan nuklir. Tetapi, dengan kekhawatiran itu pun, seharusnya prioritas diberikan pada penghapusan bertahap sebab-sebab yang mendasari ketegangan, dan upaya menciptakan kondisi di mana respons dengan ancaman penggunaan senjata nuklir tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya pilihan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pendapat Hukum Mahkamah Internasional 1996, tidak hanya penggunaan senjata nuklir itu sendiri, tetapi juga ancaman penggunaan, yang secara umum dianggap ilegal.

Hakim Ferrari Bravo, dalam sebuah Deklarasi yang dilampirkan pada Pendapat Hukum itu, berkomentar bahwa “jurang yang memisahkan Pasal 2, paragraf 4, dari Pasal 51 [Piagam PBB] telah melebar, sebagai akibat dari rintangan besar berupa kebijakan penghindaran yang dilemparkan ke dalamnya.”^[45] Seperti yang diindikasikan di sini, berlanjutnya kebijakan penghindaran dengan nuklir telah mengubah pemahaman dan penerapan hak mempertahankan diri dari yang semula digagas oleh para penyusun Piagam. Sementara Pasal 2, paragraf 4, menetapkan bahwa ancaman atau penggunaan kekerasan pada prinsipnya adalah ilegal, keberadaan senjata nuklir telah menyebabkan persiapan untuk pertahanan diri individu atau kolektif menjadi

Bahkan tanpa bentrokan senjata atau permusuhan antara negara-negara, ancaman penggunaan yang menjadi dasar penghindaran nuklir terus saja menimbulkan ketegangan militer yang melibatkan sejumlah besar negara.

sesuatu yang perlu dilakukan, yang didefinisikan dalam Pasal 51 sebagai langkah sementara yang harus diambil sampai Dewan Keamanan siap beraksi. Dengan demikian, sesuatu yang seharusnya adalah langkah pengecualian, sekarang sudah menjadi praktik lazim, sehingga menggoyahkan tujuan Piagam PBB.

Bahkan sesudah berakhirnya Perang Dingin, struktur ini tidak berubah. Bahkan tanpa bentrokan senjata atau permusuhan antara negara-negara, ancaman penggunaan yang menjadi dasar penghindaran nuklir terus saja menimbulkan ketegangan militer yang melibatkan sejumlah besar negara.

Negara-negara senjata nuklir dan sekutu-sekutu mereka sudah terobsesi dengan

kerahasiaan dan keamanan untuk melindungi informasi rahasia mengenai senjata nuklir mereka serta fasilitas-fasilitas terkait. Pada saat yang sama, negara-negara yang merasa terancam oleh negara senjata nuklir terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri dan mengejar perluasan militer. Dalam kasus terburuk, peningkatan ini menyebabkan aksi militer preventif dipertimbangkan secara serius.

Para pendukung penghindaran dengan nuklir selalu mengidentifikasi kebijakan itu sebagai kunci untuk mencegah penggunaan senjata-senjata ini. Tetapi, bila kerangka kerja untuk mempertimbangkan sifat senjata

nuklir itu diperluas agar memperhitungkan juga implikasi penuh kehidupan di era nuklir, besarnya beban yang ditimpakan pada dunia sebagai akibat kebijakan-kebijakan ini akan sangat jelas.

Saya yakin bahwa fakta bahwa senjata nuklir tidak digunakan di masa perang sejak pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dapat lebih dikaitkan dengan kesadaran akan beratnya tanggung jawab atas dampak kemanusiaan yang merusak bila senjata itu digunakan, daripada dengan efek penghindaran mana pun. Dan faktanya adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam lindungan suatu payung nuklir tidak pernah mengalami ancaman serangan nuklir. Beban moral dari ikrar untuk melepaskan pilihan nuklir inilah—misalnya, melalui penetapan Zona Bebas Senjata Nuklir (NWFZ, Nuclear-Weapon-Free Zones) yang negara-negaranya secara kolektif menolak persenjataan nuklir—yang telah dengan jelas menorehkan suatu garis batas yang negara-negara lain merasa tidak boleh mereka langgar.

Di Konferensi Wina bulan lalu, dengan mendasarkan pada konsekuensi kemanusiaan yang tidak dapat diterima serta risiko terkait senjata nuklir, Austria berikrar—dalam kapasitasnya sebagai negara peserta, bukan sebagai tuan rumah dan ketua konferensi—untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk mewujudkan dunia yang bebas senjata nuklir.

Sebelum konferensi, Kampanye Internasional untuk Menghapus Senjata Nuklir (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Dewan Gereja Dunia (WCC), dan SGI menyelenggarakan panel lintas-keyakinan dalam Forum Masyarakat Sipil bersama para praktisi keyakinan Kristen, Islam, Hindu, dan Buddhis untuk membahas jalan menuju penghapusan nuklir. Hasil diskusi ini diikhtisarkan dalam sebuah Pernyataan Bersama, yang mengungkapkan ikrar para peserta untuk bekerja demi dunia yang bebas dari senjata nuklir. Pernyataan Bersama ini diajukan dalam perdebatan umum di Konferensi Wina sebagai suara masyarakat sipil.

Kunci untuk menciptakan tindakan bersama menuju sebuah dunia tanpa senjata nuklir ditemukan dalam keberhasilan kita memusatkan energi ikrar-ikrar itu tahun ini, hari jadi ke-70 dijatuhkannya bom atom Hiroshima

PERNYATAAN BERSAMA KOMUNITAS-KOMUNITAS KEYAKINAN

Panel lintas-keyakinan “Keyakinan-keyakinan Bersatu Menentang Senjata Nuklir: Mengobarkan harapan, mengerahkan keberanian” mengeluarkan pernyataan bersama yang berikrar untuk terus menumbuhkan kesadaran mengenai tidak bisa diterimanya risiko-risiko senjata nuklir, untuk memberdayakan kaum muda, serta untuk memulai dialog di dalam dan antara tradisi-tradisi keyakinan demi menciptakan dunia yang bebas nuklir. Sebagian isi pernyataan adalah:

“Senjata nuklir adalah alat teror yang dirancang untuk menebarkan kematian dan kerusakan pada seluruh populasi, negara, Bumi sendiri ... Senjata nuklir sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh tradisi keyakinan kita masing-masing—hak manusia untuk hidup aman dan bermartabat; berlakunya hati nurani dan keadilan; kewajiban untuk melindungi golongan yang rentan dan menerapkan kepemimpinan yang akan menjaga planet ini untuk generasi-generasi mendatang.”

<http://www.sgi.org/assets/pdf/HINW14-Statement-Faith-Communities.pdf>

dan Nagasaki.

Di sini, saya ingin mengajukan dua prakarsa spesifik.

Yang pertama adalah mengembangkan suatu kerangka kerja kelembagaan baru untuk pelucutan senjata nuklir, dengan didasari NPT. Pada Desember 2014, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi penting yang mendesak negara-negara untuk mengkaji, selama Konferensi Tinjauan NPT 2015, “pilihan-pilihan untuk memerinci langkah-langkah efektif [untuk pelucutan senjata nuklir] yang dipertimbangkan dalam dan disyaratkan oleh Pasal VI Perjanjian itu.”^[46]

Sejak keputusan tahun 1995 untuk memperpanjang NPT tanpa batas waktu, baru ada sedikit kemajuan ke arah pelaksanaan berbagai kesepakatan

yang telah dicapai, padahal tantangan terus menumpuk. Resolusi ini menunjukkan rasa kemendesakan yang mendalam di antara 169 negara yang mendukung NPT sehubungan dengan kebuntuan yang berlanjut seputar masalah-masalah senjata nuklir.

Dengan konteks seperti ini, saya ingin mendesak kepala pemerintah sebanyak mungkin negara untuk menghadiri Konferensi Tinjauan NPT tahun ini. Saya juga mengusulkan agar diadakan forum dalam Konferensi Tinjauan itu untuk menyampaikan temuan-temuan konferensi internasional mengenai dampak kemanusiaan dari senjata nuklir.

Mengingat fakta bahwa semua pihak dalam NPT dengan suara bulat mengungkapkan keprihatinan mereka tentang konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan senjata nuklir dalam Konferensi Tinjauan tahun 2010, saya harap setiap kepala pemerintah atau delegasi nasional akan memperkenalkan rencana kerja negara mereka untuk mencegah terjadinya konsekuensi itu dalam Konferensi Tinjauan tahun ini. Lebih jauh saya mendesak bahwa Konferensi lebih dahulu mengadakan perdebatan mengenai langkah-langkah efektif untuk melucuti senjata nuklir yang disyaratkan Pasal VI NPT, dan bahwa Konferensi menetapkan kerangka kerja kelembagaan baru untuk mencapai tujuan ini.

NPT dipandang dibangun seputar tiga pilar: nonproliferasi, penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, dan pelucutan senjata nuklir. Dua sasaran pertama didukung oleh Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (CTBTO, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) dan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi keamanan nuklir, serta oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA, International Atomic Energy Agency). Sebaliknya, tidak ada lembaga yang dikhususkan untuk mengadakan perdebatan yang berlanjut dan memastikan kepatuhan pada kewajiban pelucutan senjata dalam NPT.

Dengan dilandasi “pelaksanaan yang tegas oleh Negara-negara senjata nuklir untuk mencapai penghapusan total persediaan senjata nuklir mereka hingga membawa pada pelucutan senjata nuklir”, yang ditekankan kembali dalam Konferensi Tinjauan tahun 2000, saya mengusulkan pembentukan

Saya sangat berharap bahwa Jepang, sebagai negara yang pernah mengalami penggunaan senjata nuklir dalam perang, akan bekerja bersama negara-negara lain dan masyarakat sipil untuk mempercepat proses mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.

komisi pelucutan senjata NPT sebagai organ pelengkap di bawah NPT untuk memastikan komitmen ini dipenuhi secara cepat dan konkret.

NPT menetapkan bahwa suatu konferensi khusus akan diadakan untuk mempertimbangkan usulan perubahan pada Perjanjian itu jika diminta oleh sepertiga atau lebih negara peserta. Komisi pelucutan NPT dapat dibentuk melalui proses semacam itu. Komisi itu akan bekerja untuk menyatukan rencana-rencana pelucutan dan rezim-rezim verifikasi guna mencapai titik tolak positif dalam upaya pelucutan senjata nuklir skala besar menuju dunia yang bebas senjata nuklir.

Prakarsa kedua yang ingin saya usulkan berkenaan dengan adopsi konvensi senjata nuklir. Meski berbagai tantangan dan tugas tetap ada, saya yakin sekali bahwa hari jadi ke-70 jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menciptakan momentum yang dapat mendorong negosiasi untuk konvensi semacam itu. Khususnya, saya menyarankan dibentuk suatu platform untuk negosiasi itu dengan dilandasi evaluasi yang cermat atas hasil Konferensi Tinjauan NPT tahun ini.

Dua tahun yang lalu, PBB menggalang “Kelompok Kerja Terbuka untuk mengembangkan usulan-usulan untuk memajukan negosiasi pelucutan senjata nuklir multilateral guna mencapai dan mempertahankan sebuah dunia tanpa senjata nuklir”. Kita dapat menjadikan ini dasar dan

mengembangkannya menjadi forum negosiasi yang akan mencakup partisipasi masyarakat sipil secara teratur.

Selain itu, resolusi Majelis Umum tahun 2013 menyerukan diadakannya konferensi internasional tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelucutan senjata nuklir paling lambat tahun 2018. Saya menyarankan agar konferensi ini diadakan pada tahun 2016 dan bahwa konferensi ini memulai proses penyusunan draf konvensi senjata nuklir. Saya sangat berharap bahwa Jepang, sebagai negara yang pernah mengalami penggunaan senjata nuklir dalam perang, akan bekerja bersama negara-negara lain dan masyarakat sipil untuk mempercepat proses mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Pelucutan Senjata akan diadakan di Hiroshima pada Agustus, dan Forum Korban Nuklir Dunia akan berlangsung pada Oktober dan November, juga di Hiroshima. Begitu pula, konferensi tahunan Pugwash akan diadakan di Nagasaki pada November.

Sudah ada perencanaan untuk Pertemuan Tingkat Tinggi Generasi Muda Dunia untuk Penghapusan Senjata Nuklir yang akan diadakan di Hiroshima pada September sebagai prakarsa bersama oleh SGI dan LSM-LSM lain. Tahun lalu, anggota generasi muda Soka Gakkai di Jepang mengumpulkan 5,12 juta tanda tangan dalam petisi yang menuntut penghapusan senjata nuklir. Saya berharap bahwa pertemuan tingkat tinggi ini akan mengadopsi deklarasi generasi muda yang berikrar akan mengakhiri zaman nuklir dan akan membantu memupuk solidaritas yang lebih besar di antara generasi muda dunia untuk mendukung perjanjian pelarangan senjata nuklir.

Dalam dialog kami, Dr. Toynbee menekankan bahwa kunci untuk memecahkan masalah senjata nuklir terletak dalam adopsi global suatu “veto yang diberlakukan sendiri”^[47] terhadap pemilikan senjata semacam itu. Pada 21 Januari tahun ini, Amerika Serikat dan Kuba memulai negosiasi menuju pemulihan hubungan diplomatik yang normal, yang terputus di tahun sebelum Krisis Misil Kuba. Bila menengok kembali sejarah, kita bisa berkata bahwa krisis itu diselesaikan dengan memakai veto yang diberlakukan sendiri—

keputusan untuk tidak memakai senjata nuklir—di pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Proses yang saya bayangkan untuk penyusunan suatu perjanjian yang melarang senjata nuklir adalah proses yang meminta setiap negara untuk berkomitmen pada veto yang diberlakukan sendiri seperti itu, dan bahwa tindakan mengekang-diri ini akan membentuk anyaman yang bersusun-susun yang mewujudkan suatu era baru—era ketika rakyat semua negara dapat menikmati kepastian bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kengerian yang disebabkan oleh penggunaan senjata nuklir.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT GLOBAL YANG BERKELANJUTAN

Bidang terakhir untuk tindakan bersama yang ingin saya bahas adalah pembangunan sebuah masyarakat global yang berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, kita harus berbagi pengalaman dan pelajaran yang dipetik sementara kita bekerja untuk mencegah memburuknya kondisi dan memulai transisi menuju masyarakat nirlimbah (zero-waste society). Upaya seperti itu akan sangat penting dalam pencapaian SDG, dan saya ingin menekankan tak tergantikannya peran kerja sama di antara negara-negara yang bertetangga untuk mencapai tujuan ini.

Konkretnya, saya mengimbau Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang agar bergabung untuk menciptakan sebuah model regional yang akan mencakup praktik-praktik terbaik yang dapat disampaikan kepada dunia, termasuk yang berkaitan dengan pengembangan bakat manusia. Pada November tahun lalu, diadakan pertemuan tingkat tinggi pertama Tiongkok-Jepang sejak dua setengah tahun lalu. Sebagai orang yang sudah lama mengusahakan dan bekerja untuk persahabatan antara kedua negara ini, saya sangat bersyukur melihat langkah pertama menuju perbaikan hubungan bilateral ini setelah kebekuan yang berkepanjangan.

Sebagai hasil pertemuan tingkat tinggi ini, pada Desember, Forum Konservasi Energi Jepang-Tiongkok dimulai kembali, dan pada 12 Januari

tahun ini, diadakan konsultasi-konsultasi mengenai Mekanisme Komunikasi Maritim Jepang-Tiongkok. Mekanisme ini dapat memainkan peran sangat penting dalam mencegah meruncingnya insiden apa pun, dan saya berharap upaya-upaya untuk memulai kegiatan tahun ini juga seperti yang disepakati kedua pemimpin akan berjalan lancar.

Tahun ini menandai hari jadi ke-50 normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Meski masih harus ada upaya untuk meredakan ketegangan antara kedua negara, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa interaksi manusia-dengan-manusia selama ini terus meluas, dengan sekitar lima juta orang sekarang bepergian antara Korea dan Jepang setiap tahun, angka yang bahkan lebih besar daripada antara Tiongkok dan Jepang. Ketika hubungan bilateral dinormalisasi pada tahun 1965, angka tahunan ini hanya 10.000 orang. Walaupun survei pendapat publik mengungkapkan bahwa cukup besar persentase orang baik di Korea maupun Jepang yang tidak memiliki opini yang baik tentang negara lainnya, lebih dari 60 persen mengakui pentingnya hubungan ini.

Selain interaksi semacam ini, saya menyimpan ekspektasi tinggi menyangkut bentuk-bentuk kerja sama trilateral yang telah berkembang mantap selama sekitar 12 tahun terakhir ini. Sejak awal kerja sama trilateral di bidang lingkungan pada tahun 1999, sekarang ada lebih dari 50 mekanisme konsultasi termasuk 18 pertemuan tingkat menteri dan lebih dari 100 proyek kerja sama. Untuk mendorong kerja sama itu berkembang lebih jauh, pertemuan tingkat tinggi trilateral Tiongkok-Korea-Jepang harus diperbaharui setelah terhenti tiga tahun akibat meningkatnya ketegangan politik.

Dengan semakin dekatnya adopsi SDG, pertemuan tingkat tinggi semacam itu sebaiknya dimulai lagi secepat mungkin untuk meneguhkan tren relasi yang membaik ini, sambil membangun ke arah kesepakatan formal untuk menjadikan wilayah ini sebuah model keberlanjutan. Para pemimpin ketiga negara harus menandai hari jadi ke-70 akhir Perang Dunia II dengan memasukkan pelajaran-pelajaran dari konflik ini dalam suatu ikrar untuk tidak pernah berperang lagi, dan harus memulai upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya yang kukuh melalui kerja sama regional

untuk mendukung tantangan baru SDG yang dilaksanakan PBB.

Dalam pertemuan-pertemuan saya dengan para pemimpin politik, intelektual, dan budaya dari Tiongkok dan Korea termasuk Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai (1898-1976) dan Perdana Menteri Korea Lee Soo-sung, kami membahas cara agar Jepang dan Tiongkok serta Jepang dan Korea dapat memperdalam ikatan persahabatan untuk memberikan kontribusi yang abadi kepada dunia.

Jean Monnet (1888-1979), yang memainkan peran utama dalam membantu Perancis dan Jerman mengatasi permusuhan mereka yang sudah berlangsung berabad-abad, menegaskan selama negosiasi antara negara-negara Eropa pada tahun 1950, “Kita di sini untuk melaksanakan suatu tugas bersama—bukan untuk bernegosiasi demi keuntungan bangsa kita sendiri, tetapi untuk keuntungan semua.”^[48]

Pada September 2011, Sekretariat Kerja Sama Trilateral didirikan di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Salah satu peran sekretariat ini adalah mengidentifikasi proyek-proyek kerja sama yang potensial. Saya harap ketiga negara ini akan bekerja bersama demi keuntungan semua di setiap bidang yang disebutkan dalam SDG baru.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, SGI akan ikut mensponsori acara tambahan di Konferensi Dunia PBB Ketiga tentang Pengurangan Risiko Bencana. Dalam acara ini wakil-wakil masyarakat sipil dari ketiga negara akan bertemu untuk membahas kerja sama regional menuju pencegahan bencana dan pemulihan pasca-bencana. Ini diadakan dengan dukungan Sekretariat Kerja Sama Trilateral, dan saya yakin ini merupakan jenis keterlibatan positif di level akar rumput yang akan melengkapi kerja sama regional antar-pemerintah menuju pencapaian SDG.

Dalam hal ini, saya ingin mengajukan dua usulan untuk memperluas pertukaran akar rumput.

Yang pertama berfokus pada generasi muda. Titik balik utama dalam relasi pascaperang antara Perancis dan Jerman adalah Perjanjian Elysee

tahun 1963, yang memulai era pertukaran yang amat luas di antara generasi muda. “Permusuhan berabad-abad dapat digantikan oleh persahabatan mendalam.”^[49] Kata-kata ini datang dari sebuah artikel yang ditulis bersama oleh Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius dan Perdana Menteri Jerman Guido Westerwelle pada tahun 2013, untuk menandai hari jadi ke-50 Perjanjian Elysee. Dan memang, lebih dari delapan juta orang muda yang mendapat kesempatan untuk tinggal atau belajar di negara mitra itu telah memainkan peran penting dalam menciptakan ikatan-ikatan kuat yang menghubungkan kedua masyarakat.

Delapan tahun yang lalu, sebuah program pertukaran generasi muda dimulai antara Tiongkok, Korea, dan Jepang, dan saya harap tahun ini akan menjadi kesempatan untuk meluaskan skala program ini. Selain menambah pertukaran budaya atau pendidikan seperti pertukaran antara siswa SMA atau mahasiswa, saya ingin melihat dibentuknya kemitraan generasi muda Tiongkok-Korea-Jepang sebagai sarana orang muda untuk bisa aktif berkolaborasi dalam upaya-upaya mewujudkan SDG atau prakarsa kerja sama trilateral lain.



Generasi muda Korea mengunjungi Kyushu dalam rangkaian acara pertukaran persahabatan Korea-Jepang, September 2011

Bagi peserta individu, pengalaman bekerja sama menangani tantangan-tantangan berat dalam masalah lingkungan atau yang berkaitan dengan bencana adalah pengalaman yang sangat berharga, yang mengukirkan dalam kehidupan muda mereka keyakinan bahwa mereka sedang menciptakan masa depan mereka sendiri. Lebih jauh lagi, harta seumur hidup itu pasti akan menjadi fondasi persahabatan dan rasa percaya yang akan menjangkau jauh ke masa depan.

Dalam tiga dasawarsa sejak penandatanganan perjanjian pertukaran antara Divisi Generasi Muda Soka Gakkai dan Federasi Generasi Muda Seluruh Tiongkok (ACYF) pada tahun 1985, pertukaran-pertukaran sudah berjalan secara teratur. Pada Mei 2014, ditandatangani perjanjian pertukaran sepuluh-tahun yang baru, dengan janji akan terus bekerja bersama untuk meningkatkan persahabatan antara kedua negara. Anggota divisi generasi muda Soka Gakkai di Kyushu bahkan terlibat dalam beraneka ragam kegiatan pertukaran dengan Korea. Semua kegiatan ini tumbuh dari keyakinan bahwa jejaring antara orang muda yang dipupuk melalui tatap muka dan pertukaran pada akhirnya menjadi faktor yang paling menentukan dalam membangun dunia yang lebih damai dan manusiawi di abad ke-21.

Usulan kedua saya adalah meningkatkan jumlah pertukaran kota kembar (sister-city) antara ketiga negara, dengan membidik tahun 2030, tenggat waktu SDG.

Ketika saya bertemu dengan Perdana Menteri Zhou Enlai 40 tahun yang lalu, kesamaan minat kami yang paling mencolok adalah memperdalam hubungan persahabatan antara warga negara kedua negara. Dalam seruan saya pada September 1968 untuk normalisasi hubungan Tiongkok-Jepang, saya menyatakan, “Normalisasi hubungan antara negara-negara hanya akan bermakna bila rakyat kedua negara saling memahami dan berinteraksi dengan cara-cara yang saling menguntungkan, sehingga berkontribusi pada perdamaian dunia.” Sama seperti itu, Perdana Menteri Zhou berpendapat bahwa persahabatan abadi Tiongkok-Jepang hanya dapat terwujud bila rakyat kedua negara betul-betul saling memahami dan saling percaya. Ketika kami bertemu, dia bercerita tentang pengalamannya sendiri di masa

muda sewaktu tinggal dan belajar di Jepang selama satu setengah tahun, dan mau tak mau saya merasa bahwa ini membentuk perspektifnya.

Pada tahun 1916, tahun sebelum Zhou datang ke Jepang untuk belajar, filosof politik Jepang Sakuzo Yoshino (1878-1933) menulis yang berikut ini dengan latar hubungan Tiongkok-Jepang yang memburuk, “Jika ada rasa percaya dan hormat antara warga negara, bahkan jika timbul permusuhan atau kesalahpahaman mengenai masalah politik atau ekonomi, ini akan seperti gelombang permukaan laut yang dipecah angin, sementara arus hubungan yang mengalir jauh di dalam tetap tidak terganggu.”^[50]

Ini mengungkapkan keyakinan yang sudah lama saya pegang. Jika manusia dari kebangsaan yang berlainan dapat terlibat dalam pertukaran hati, dengan memikirkan kebahagiaan satu sama lain, pohon besar persahabatan yang terpuuk akan sanggup bertahan dalam angin dan hujan, menjulurkan cabang-cabang rimbunnya jauh ke masa depan.

Sekarang ini ada 356 perjanjian kota kembar pemerintah lokal antara Tiongkok dan Jepang, 156 antara Jepang dan Korea Selatan, dan 151 antara Tiongkok dan Korea Selatan. Kita harus terus memperluas pertukaran kota kembar semacam itu sambil membina ikatan persahabatan satu orang-dengan-satu orang yang amat penting.

SEMANGAT DASAR KITA

Dalam mengajukan usulan-usulan konkret ini, saya sangat menyadari bahwa pada akhirnya solidaritas rakyat biasalah yang akan mendorong umat manusia dalam upaya-upaya kita memenuhi tantangan yang kita hadapi, seperti tantangan yang akan ditangani lewat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang baru.

Hari ini empat puluh tahun yang lalu, pada 26 Januari 1975, wakil dari 51 negara dan wilayah berkumpul di Guam untuk mendirikan SGI. Visi Presiden Toda mengenai kewarganegaraan global dan tekad beliau untuk menghapus kesengsaraan dari Bumi terasa begitu nyata bagi saya saat itu. Ketika saya memutuskan untuk menulis “dunia” di sebelah tanda tangan

saya dalam kolom “kebangsaan” dalam konferensi peresmian itu, saya mengungkapkan sumpah saya untuk memenuhi visi guru saya.

Deklarasi yang diadopsi dalam pertemuan pertama itu menegaskan semangat dasar kita dalam kata-kata berikut ini:

Dalam penciptaan perdamaian, ikatan hati-ke-hati antara orang-orang yang menyadari kesakralan hidup lebih kuat lagi daripada ikatan ekonomi atau politik antara negara-negara ... Perdamaian abadi tidak dapat dicapai tanpa mewujudkan kebahagiaan seluruh umat manusia. Karena itu, kami akan berusaha keras agar gagasan Buddhis kewelasasihan menjadi dasar suatu orientasi filosofis baru yang menginspirasi kontribusi nyata pada kelangsungan dan pertumbuhan umat manusia.

Semangat ini tetap tak berubah hari ini, sementara gerakan kita telah menyebar ke 192 negara dan wilayah.

Dengan berpijak kuat pada fondasi persahabatan dan dialog yang semakin luas, kita akan terus bekerja demi sebuah dunia tanpa senjata nuklir atau perang, serta demi menghapus kesengsaraan dari muka Bumi, untuk menciptakan sebuah masyarakat baru tempat semua orang dapat sepenuhnya menikmati karunia martabat manusia.

Catatan

1. UN DESA, “*Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals.*”
2. (diterjemahkan dari) Toda, *Toda Josei zenshu*, 3:290.
3. King, *The Trumpet of Conscience*, 24.
4. (diterjemahkan dari) Toda, *Toda Josei zenshu*, 3:74.
5. Francis, “Apostolic Exhortation,” para. 53.
6. Lihat Nakamura, *Genshi butten o yomu*, 195.
7. Gandhi, *The Collected Works*, 89:125.
8. (diterjemahkan dari) Nakamura, *Genshi butten o yomu*, 219.
9. (diterjemahkan dari) Makiguchi, *Makiguchi Tsunesaburo zenshu*, 10:209-10.
10. Lihat Ikeda, *A Forum for Peace*, 258-67.
11. *Ibid.*, 195-98.
12. Lihat Makiguchi, *Makiguchi Tsunesaburo zenshu*, 2:207-08.
13. Ikeda dan Boulding, *Into Full Flower*, 93.
14. NRC dan IDMC, “Global Estimates 2014,” 15.
15. Fujimori, “Teishotoku koreisha no jittai to motomerareru shotoku hosho seido”; dan Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, “Graphical Review of Japanese Household,” 25.
16. Nussbaum, *Frontiers of Justice*, 237.
17. Nārada, terj., *The Dhammapada*, 23:12:331.
18. (diterjemahkan dari) Nichiren, *Nichiren Daishonin gosho zenshu*, 769.
19. Erikson, *Insight and Responsibility*, 114.
20. Lihat Erikson, *Childhood and Society*, 266-67.
21. Erikson, *Gandhi’s Truth*, 407-08.
22. Mandela, “Gandhi the Prisoner.”
23. Toynbee, *East to West*, 221.
24. Havel, “Europe as Task.”
25. Hammarskjöld, “Introduction to the Annual Report,” 8.
26. Lihat Maritain, *Man and the State*, 76.
27. Hammarskjöld, “Address at the Inauguration,” 2:375.
28. Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, 296.
29. UN General Assembly, “Implementing Actions Proposed,” 2.
30. UNHCR, “UNHCR Global Trends 2013,” 2-3.
31. Milner dan Loescher, “Responding to Protracted Refugee Situations,” 3.
32. UNHCR, “UNHCR Global Trends 2013,” 3.
33. Jacobsen, “The Forgotten Solution,” 9; and Fielden, “Local Integration,” 6-12.
34. Lihat “Foramu 21 seiki e no sozo.”
35. Biko, *I Write What I Like*, 47.

36. UN General Assembly, "Establishment of a Commission."
37. Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, "Report and Summary," 2.
38. (diterjemahkan dari) Toda, *Toda Josei zenshu*, 4:565.
39. Ikeda dan Rotblat, *A Quest for Global Peace*, 52.
40. (diterjemahkan dari) "Hiroshima, Nagasaki, Okinawa seinen-bu ga heiwa samitto."
41. deBrum, "Statement at the General Debate," 1.
42. Ibid.
43. Global Zero, "World Spending on Nuclear Weapons," 1.
44. UN General Assembly, "2010 Review Conference," 21.
45. ICJ, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 284.
46. UN General Assembly, "Towards a Nuclear-weapon-free World," 6.
47. Ikeda dan Toynebee, *Choose Life*, 194.
48. Monnet, *Memoirs*, 323.
49. Westerwelle dan Fabius, "Germany and France at the Service of Europe."
50. (diterjemahkan dari) Yoshino, *Yoshino Sakuzo senshu*, 8:218-19.

Daftar Pustaka

Arendt, Hannah. 1973. *The Origins of Totalitarianism* [Asal Mula Totaliterisme]. Orlando, Austin, New York, San Diego dan London: Harcourt.

Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs. 2014. "Report and Summary of Findings of the Conference: Presented under the Sole Responsibility of Austria" [Laporan dan Ikhtisar Temuan-temuan Konferensi: Dikemukakan atas Tanggung Jawab Tunggal Austria]. Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons. December 9. http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/HINW14_Chair_s_Summary.pdf (diakses 26 Januari 2015).

Biko, Steve. 1987. *I Write What I Like: A Selection of His Writings* [Saya Menulis yang Saya Suka: Kumpulan Tulisan-tulisannya] London: Heinemann.

deBrum, Tony. 2014. "Statement at the General Debate of the 3rd Meeting of the Preparatory Committee for the 2015 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference" [Pernyataan dalam Debat Umum Pertemuan Ketiga Panitia Persiapan untuk Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir 2015]. 28 April. http://unrcpd.org/wp-content/uploads/2014/04/28April_MarshallIslands.pdf (diakses 26 Januari 2015).

Erikson, Erik H. 1950. *Childhood and Society* [Masa Kanak-kanak dan Masyarakat]. New York dan London: W. W. Norton.

-----, 1964. *Insight and Responsibility* [Wawasan dan Tanggung Jawab]. New York: W. W. Norton.

-----, 1969. *Gandhi's Truth: On the Origins of Militant Nonviolence* [Kebenaran Gandhi: Asal Mula Non-kekerasan yang Militan]. New York: W. W. Norton.

Fielden, Alexandra. 2008. "Local Integration: An Under-reported Solution to Protracted Refugee Situations" [Integrasi Lokal: Solusi yang Kurang Diberitakan untuk Situasi Pengungsi yang Berlarut-larut]. New Issues in Refugee Research Series. Research Paper No. 158. Juni. <http://www.unhcr.org/486cc99f2.pdf> (diakses 26 Januari 2015).

Francis, Pope. 2013. "Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium of the Holy Father Francis to the Bishops, Clergy, Consecrated Persons and the Lay Faithful on the Proclamation

of the Gospel in Today's World" [Evangeliū Gaudium, Imbauan Apostolik Bapa Suci Francis kepada Para Uskup, Imam, Orang yang Dibaptis, dan Jemaat mengenai Proklamasi Gospel di Dunia Dewasa Ini]. Libreria Editrice Vaticana. 24 November. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii_gaudium.html (diakses 26 Januari 2015).

Fujimori, Katsuhiko. 2012. "Teishotoku koreisha no jittai to motomerareru shotoku hosho seido" [Kaum Lansia Berpenghasilan Rendah dan Sistem Jaminan Penghasilan yang Diperlukan]. http://www.mizuho-ir.co.jp/publication/contribution/2012/nenkintokeizai01_01.html (diakses 26 Januari 2015).

Gandhi, Mahatma. 1959-98. *The Collected Works of Mahatma Gandhi* [Kumpulan Karya Mahatma Gandhi]. 100 jilid. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

Global Zero. 2011. "World Spending on Nuclear Weapons Surpasses \$1 Trillion per Decade" [Pengeluaran Dunia untuk Senjata Nuklir Melebihi \$1 Triliun per Dasawarsa]. Global Zero Technical Report. Juni. http://www.globalzero.org/files/gz_nuclear_weapons_cost_study.pdf (diakses 26 Januari 2015).

Hammarskjöld, Dag. 1960. "Introduction to the Annual Report of the Secretary-General on the Work of the Organization, 16 June 1959-15 June 1960" [Pengantar Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal mengenai Hasil Kerja Organisasi, 16 Juni 1959-15 Juni 1960]. A/4390/Add.1. 31 Agustus. <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL6/006/48/PDF/NL600648.pdf?OpenElement> (diakses 26 Januari 2015).

-----, 1954. "Address at the Inauguration of the Twenty-fifth Anniversary of the Museum of Modern Art" [Pidato dalam Pembukaan Hari Jadi Ke-25 Museum Seni Modern]. Dalam Cordier, Andrew W., dan Wilder Foote, editor. 1969-77. *Public Papers of the Secretaries-General of the United Nations*. 8 volume. New York: Columbia University Press.

Havel, Václav. 1996. "Europe as Task: An Address in Aachen" [Eropa sebagai Tugas: Sebuah Pidato di Aachen]. 15 Mei. http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=173_aj_projevy.html&typ=HTML (diakses 26 Januari 2015).

ICJ (International Court of Justice, Mahkamah Internasional). 1996. *Legality of the Threat*

or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 [Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir, Pendapat Hukum, Laporan MI 1996]. <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7507.pdf> (diakses 26 Januari 2015).

Ikeda, Daisaku. 2013. *Proposal for the Normalization of Sino-Japanese Relations* [Proposal untuk Normalisasi Hubungan Cina-Jepang]. Hong Kong: Soka Gakkai International of Hong Kong.

-----, 2014. *A Forum for Peace: Daisaku Ikeda's Proposals to the UN* [Sebuah Forum untuk Perdamaian: Proposal Daisaku Ikeda kepada PBB]. Disunting oleh Olivier Urbain. London and New York: I.B. Tauris.

-----, dan Arnold Toynbee. 2007. *Choose Life* [Pilihlah Kehidupan]. London: I.B. Tauris.

-----, dan Joseph Rotblat. 2007. *A Quest for Global Peace* [Pencarian Perdamaian Global]. London: I.B. Tauris.

-----, dan Elise Boulding. 2010. *Into Full Flower* [Mekar Penuh] Cambridge, Massachusetts: Dialogue Path Press.

Jacobsen, Karen. 2001. "The Forgotten Solution: Local Integration for Refugees in Developing Countries" [Solusi yang Terlupakan: Integrasi Lokal untuk Pengungsi di Negara-negara Berkembang]. *New Issues in Refugee Research Series. Working Paper No. 45*. 1 Juli. <http://www.unhcr.org/3b7d24059.html> (diakses 26 Januari 2015).

Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. 2014. "Graphical Review of Japanese Household" [Tinjauan Grafis Rumah Tangga Jepang]. <http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21-h25.pdf> (diakses 26 Januari 2015).

King, Martin Luther, Jr. 1967. *The Trumpet of Conscience* [Seruan Hati Nurani]. New York: Harper & Row.

Makiguchi, Tsunesaburo. 1981-97. *Makiguchi Tsunesaburo zenshu* [Karya-karya Lengkap Tsunesaburo Makiguchi]. 10 jilid. Tokyo: Seikyo Shimbunsha.

Mandela, Nelson. 1994. "Gandhi the Prisoner" [Gandhi sang Tahanan]. Diulang dari

B.R. Nanda, ed. 1995. *Mahatma Gandhi: 125 Years* [Mahatma Gandhi: 125 Tahun]. New Delhi: Indian Council for Cultural Relations. South African History Online. <http://www.sahistory.org.za/archive/gandhi-prisoner> (diakses 26 Januari 2015).

Maritain, Jacques. 1951. *Man and the State* [Manusia dan Negara]. Chicago: University of Chicago.

Milner, James, dan Gil Loescher. 2011. “Responding to Protracted Refugee Situations: Lessons from a Decade of Discussion” [Menanggapi Situasi Pengungsi yang Berlarut-larut: Pelajaran dari Satu Dasawarsa Diskusi]. RSC Policy Briefing Paper No. 6. Refugee Studies Centre. <http://www.refworld.org/docid/4da83a682.html> (diakses 26 Januari 2015).

Monnet, Jean. 1976. *Memoirs* [Memoar]. Terj. oleh Richard Mayne. London: Collins.

Nakamura, Hajime. 1985. *Genshi butten o yomu* [Membaca Sutra-sutra Buddhis Awal]. Tokyo: Iwanami Shoten.

Nārada Maha Thera, terj. 2002. *The Dhammapada*. Bab 23. <http://www.metta.lk/english/Narada/23-Naga%20Vagga.htm> (diakses 26 Januari 2015).

Nichiren. 1952. *Nichiren Daishonin goshu zenshu* [Karya-karya Lengkap Nichiren Dais-honin]. Disunting oleh Nichiko Hori. Tokyo: Soka Gakkai.

NRC (Norwegian Refugee Council) and IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre). 2014. “Global Estimates 2014: People Displaced by Disasters” [Estimasi Global 2014: Orang-orang yang Mengungsi karena Bencana]. <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201409-global-estimates2.pdf> (diakses 26 Januari 2015).

Nussbaum, Martha C. 2006. *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership* [Perbatasan Keadilan: Disabilitas, Kebangsaan, Keanggotaan Spesies]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Soka Shimpo. 2012. “Hiroshima, Nagasaki, Okinawa seinen-bu ga heiwa samitto” [Pertemuan Tingkat Tinggi Perdamaian yang Diadakan oleh Anggota Divisi Generasi Muda dari Hiroshima, Nagasaki, dan Okinawa]. 15 Agustus, h. 1.

Toda, Josei. 1981-90. *Toda Josei zenshu* [Karya-karya Lengkap Josei Toda]. 9 jilid. Tokyo: Seikyo Shimbunsha.

Toynbee, Arnold J. 1958. *East to West: A Journey Round the World* [Timur ke Barat: Perjalanan Mengelilingi Dunia]. New York dan London: Oxford University Press.

UN (United Nations). 1945. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: Pembukaan. <http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml> (diakses 26 Januari 2015).

-----, DESA (Department of Economic and Social Affairs). 2014. "Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals" [Proposal Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan]. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal> (diakses 26 Januari 2015).

-----, General Assembly. 1946. "Establishment of a Commission to Deal with the Problems Raised by the Discovery of Atomic Energy" [Pembentukan Komisi untuk Menangani Masalah-masalah yang Ditimbulkan oleh Penemuan Energi Atom]. A/RES/1(I). Diadopsi oleh Majelis Umum. 24 Januari. [http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1\(I\)](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1(I)) (diakses 26 Januari 2015).

-----, -----, 2000. "2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Final Document" [Konferensi Tinjauan 2000 antara Pihak-pihak Penanda-tangan Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir: Dokumen Final]. NPT/CONF.2000/28 (Bagian I dan II). <http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/2000-NPT/OfficialDocs2.shtml> (diakses 26 Januari 2015).

-----, -----, 2004. "Implementing Actions Proposed by the United Nations High Commissioner for Refugees to Strengthen the Capacity of His Office to Carry Out Its Mandate" [Melaksanakan Tindakan-tindakan yang Diusulkan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi untuk Memperkuat Kapasitas Kantornya untuk Melaksanakan Mandat]. A/RES/58/153. Diadopsi oleh Majelis Umum. 24 Februari. <http://www.refworld.org/docid/4067da904.html> (diakses 26 Januari 2015).

-----, -----, 2010. "2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Final Document" [Konferensi Tinjauan 2010 antara Pihak-

pihak Penanda-tangan Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir: Dokumen Final]. NPT/CONF.2010/50 (Vol. I). <http://www.un.org/en/conf/npt/2010/> (diakses 26 Januari 2015).

-----, -----, 2014. "Towards a Nuclear-weapon-free World: Accelerating the Implementation of Nuclear Disarmament Commitments" [Menuju Dunia yang Bebas Senjata Nuklir: Mempercepat Pelaksanaan Komitmen-komitmen Pelucutan Nuklir]. A/RES/69/37. Diadopsi oleh Majelis Umum. 11 Desember. <http://www.un.org/en/ga/69/resolutions.shtml> (diakses 26 Januari 2015).

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). 2014. "UNHCR Global Trends 2013" [Tren-tren Global UNHCR 2013]. 20 Juni. <http://www.unhcr.org/5399a14f9.html> (diakses 26 Januari 2015).

Westerwelle, Guido, dan Laurent Fabius. 2013. "Germany and France at the Service of Europe" [Jerman dan Perancis Siap Membantu Eropa]. Diulang dari *Le Monde* et al., 22 Januari. <http://www.franceintheus.org/spip.php?article4242> (diakses 26 Januari 2015).

Yomiuri Shimbun. 1995. "Foramu 21 seiki e no sozo" [Forum: Kreativitas di Abad Ke-21]. 29 November, h. 14.

Yoshino, Sakuzo. 1995-96. *Yoshino Sakuzo senshu* [Karya-karya Terpilih Sakuzo Yoshino]. 15 jilid. Tokyo: Iwanami Shoten.

Proposal Perdamaian Tahunan oleh Daisaku Ikeda setiap 26 Januari, Hari SGI

- 2014—Penciptaan Nilai untuk Perubahan Global: Membangun Masyarakat yang Berdaya Lenting dan Berkelanjutan
- 2013—Welas Asih, Kebijaksanaan dan Keberanian: Membangun Masyarakat Global Perdamaian dan Koeksistensi Kreatif
- 2012—Keamanan dan Keberlanjutan Kemanusiaan: Berbagi Rasa Hormat untuk Martabat Kehidupan
- 2011—Menuju Dunia Bermartabat untuk Semua: Kemenangan Kehidupan Kreatif
- 2010—Menuju Era Baru Penciptaan Nilai
- 2009—Menuju Perlombaan Kemanusiaan: Arus Baru dalam Sejarah
- 2008—Memanusiakan Agama, Menciptakan Perdamaian
- 2007—Memulihkan Hubungan Manusia: Langkah Awal Perdamaian Global
- 2006—Era Baru untuk Semua Orang: Penempatan Jaringan Global Individu-individu Kuat
- 2005—Menuju Era Baru Dialog: Kemanusiaan Terjelajahi
- 2004—Transformasi dari Dalam: Menciptakan Gelombang Global untuk Perdamaian
- 2003—Etika Global Koeksistensi: Menuju Paradigma “Sebesar Hidup” di Zaman Kita
- 2002—Humanisme Jalan Tengah: Fajar Peradaban Global
- 2001—Menciptakan dan Memberlanjutkan Abad Kehidupan: Tantangan-tantangan Era Baru
- 2000—Perdamaian Melalui Dialog: Waktunya Berbicara
- 1999—Menuju Kebudayaan Perdamaian: Pandangan Kosmos
- 1998—Kemanusiaan dan Milenium Baru: Dari Kaos Menuju Kosmos
- 1997—Horison Baru Peradaban Global
- 1996—Menuju Milenium Ketiga: Tantangan Kewarganegaraan Global
- 1995—Menciptakan Abad tanpa Perang Melalui Solidaritas Kemanusiaan
- 1994—Cahaya Semangat Global: Fajar Baru dalam Sejarah Manusia

- 1993—Menuju Dunia yang Lebih Berkemanusiaan dalam Abad Mendatang
- 1992—Renaissans Harapan dan Harmoni
- 1991—Fajar Abad Kemanusiaan
- 1990—Kemenangan Demokrasi: Menuju Abad Harapan
- 1989—Menuju Globalisme Baru
- 1988—Pemahaman Budaya dan Pelucutan Senjata: Blok-blok Pembangunan Perdamaian Dunia
- 1987—Menyebarkan Kecemerlangan Perdamaian Melalui Abad Kemanusiaan
- 1986—Dialog untuk Perdamaian yang Abadi
- 1985—Gelombang Baru Perdamaian menuju Abad Kedua Puluh Satu
- 1984—Dunia tanpa Perang
- 1983—Proposal-proposal Baru untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata

Sebuah Forum untuk Perdamaian: Proposal-proposal Daisaku Ikeda untuk PBB, sebuah buku yang berisikan gambaran-gambaran akan proposal perdamaian Ikeda selama tiga puluh tahun, telah diterbitkan oleh I.B. Tauris pada Januari 2014, dengan kata sambutan dari Duta Besar Anwarul K. Chowdhury, mantan Sekretaris Umum dan Perwakilan PBB.

Profil Penulis

Filsuf, penulis Buddhisme dan penyokong perdamaian, Daisaku Ikeda adalah presiden Soka Gakkai International (SGI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dengan lebih dari 12 juta anggota di 192 negara dan wilayah. Beliau juga adalah pendiri banyak institusi, beberapa di antaranya adalah Institut Filosofi Oriental (Institute of Oriental Philosophy), Pusat Ikeda untuk Perdamaian, Pembelajaran dan Dialog (Ikeda Center for Peace, Learning and Dialogue), Institut Toda untuk Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Global (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) dan sistem pendidikan komprehensif Soka.



Lahir di Tokyo pada tahun 1928, Ikeda merasakan langsung kehilangan, penderitaan dan kekacauan negara dalam perang. Dalam kekacauan pasca-perang Jepang, beliau memeluk Buddhisme melalui pertemuannya dengan pendidik dan penganut pasifisme, Josei Toda, ketua organisasi umat Buddhis awam Soka Gakkai yang dipenjarakan selama Perang Dunia II karena kepercayaannya. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk perhatian Ikeda akan kondisi manusia dan mendasari usahanya menuju penciptaan kebudayaan global perdamaian.

Selama bertahun-tahun, Ikeda telah berdialog dengan banyak pemikir ternama dunia, berpidato di lebih dari lima puluh negara, menginspirasi dukungan SGI kepada kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan menulis secara ekstensif tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan kemanusiaan.

Tema utama dari karya-karya penulis adalah pendalamannya terhadap upaya-upaya perubahan dimana martabat kemanusiaan dan perdamaian dapat sekaligus dapat diterima dan dijangkau oleh umat manusia. Proposal tahunannya untuk perdamaian diterbitkan setiap tahunnya pada hari berdirinya SGI—26 Januari 1975—mengulas keadaan dunia dan menawarkan usul-usul inisiasi praktis sebagai respon penuh semangat berdasarkan filosofi Buddhisme.

IKRAR BERSAMA UNTUK
MASA DEPAN YANG LEBIH MANUSIAWI:
MENGHAPUS KESENGSARAAN DARI BUMI

